



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS NILAI EKSPOR DAN IMPOR ANTARA
INDONESIA – JEPANG DALAM RANGKA LIBERALISASI
PERDAGANGAN INDONESIA – JEPANG (IJEPA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**IBNU SINA
0606012503**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI GLOBALISASI
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Ibnu Sina
NPM : 0606012503
Tanda Tangan : 
Tanggal : Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ibnu Sina

NPM : 0606012503

Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Analisis Nilai Ekspor Dan Impor Antara Indonesia – Jepang
Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan Indonesia –
Jepang (IJEPA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

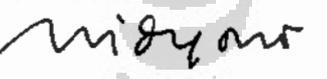
Pembimbing : Dr. Maddaremmeng A.P

()

Penguji : Dr. Sonny Harry B.

()

Penguji : Dr. Widyono Soetjipto

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini, tesis ini merupakan karya akhir saya sebagai prasyarat untuk meraih gelar Master Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).

Selanjutnya kepada keluarga tercinta saya persembahkan semua ini, yang tersayang orang tua yang selalu mengiringi langkah saya dengan doa dan restunya, kakak dan adik selanjutnya keponakan dan keluarga besar kepada merekalah sesungguhnya tesis dan hasil pendidikan ini saya serahkan.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak mulai masa perkuliahan sampai dengan tahap penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Dalam proses penyelesaian tesis ini banyak pihak yang telah ikut serta membantu saya dan memberikan saran serta pengorbanannya hingga tuntasnya penulisan tesis ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr Maddaremmeng, dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan luar biasa untuk membimbing dan menguji saya. Terima kasih atas seluruh kesabarannya yang luar biasa dalam mengoreksi dan membimbing saya serta menyempatkan waktu luang untuk berbagi, berbincang bincang tentang banyak hal yang sangat bermanfaat bagi saya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Bapak sekeluarga.
2. Pimpinan dan staf Program MPKP FEUI, yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu dan juga staf pengajar yang telah sabar memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat serta staff administrasi yang ramah dan santun yang telah membantu kelancaran proses pengajaran berlangsung.
3. Teman teman seangkatan yang selalu memberikan dukungan moril kepada saya.
4. Selanjutnya para sahabat semua yang selalu memberikan semangat dan telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

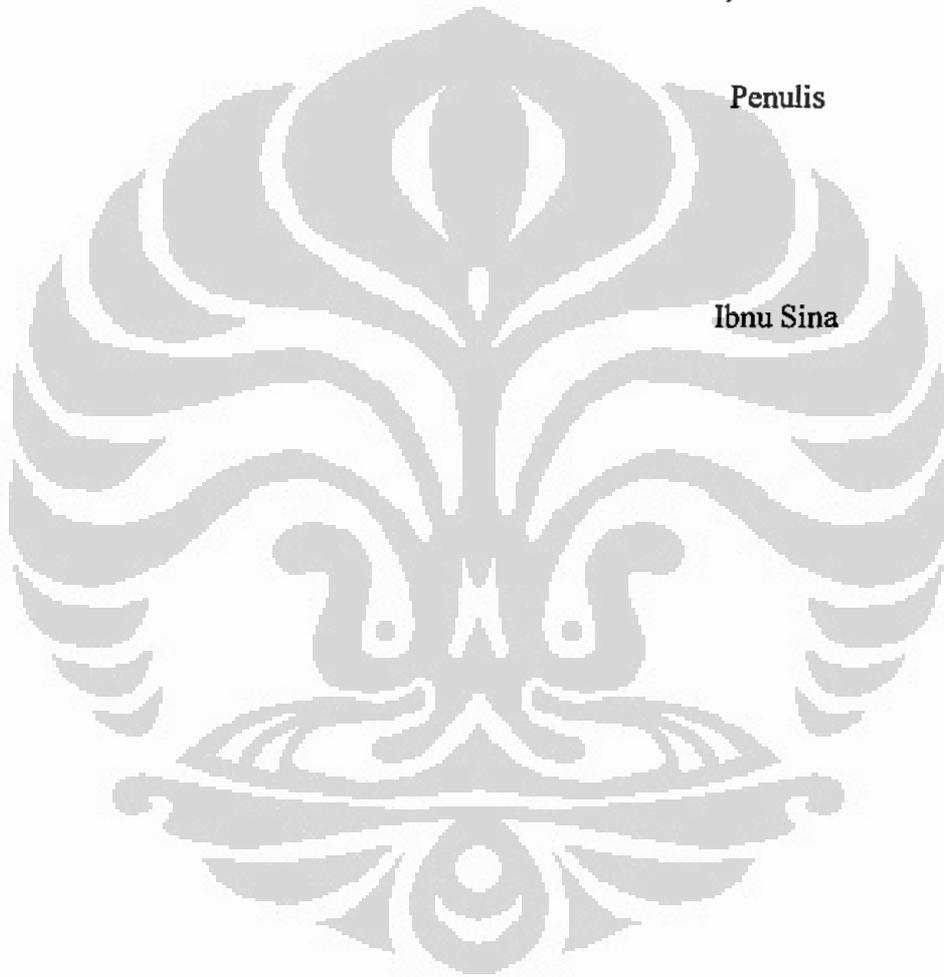
5. Selanjutnya pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan jadwal yang diharapkan

Akhirnya “tak ada gading yang tak retak”, sehingga saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun untuk kebaikan tesis ini sangat saya harapkan, semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan kecil dalam dinamika dunia pendidikan dan keilmuan.

Jakarta, Desember 2009

Penulis

Ibnu Sina



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Sina
NPM : 0606012503
Kekhususan : Ekonomi Globalisasi
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Nilai Ekspor Dan Impor Antara Indonesia – Jepang Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan Indonesia – Jepang (IJEPA) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Desember 2009

Yang menyatakan



(Ibnu Sina)

ABSTRAK

Nama : Ibnu Sina
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Nilai Ekspor Dan Impor Antara Indonesia – Jepang Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan Indonesia – Jepang (IJEPA)

Tesis ini dilatarbelakangi dengan diterapkannya persetujuan kemitraan ekonomi serta penurunan tarif bea masuk antara Indonesia dan Jepang (IJEPA). Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah akan dilihat sejauh mana pengaruh penerapan IJEPA tersebut terhadap nilai perdagangan antara Indonesia dengan Jepang.

Tesis ini merupakan analisis ekspor impor Indonesia - Jepang dalam rangka liberalisasi perdagangan Indonesia – Jepang (IJEPA) dengan menggunakan pendekatan model persamaan regresi untuk melihat hubungan antara ekspor dan impor (sebagai *variable dependent*) dengan GDP Indonesia dan Jepang, nilai tukar JPY terhadap Rupiah, dan pemberlakuan IJEPA (sebagai *variable independent*) dan berasal dari pengumpulan data kuantitatif sekunder.

Studi ini membahas faktor-faktor yang terkait dengan nilai ekspor Indonesia ke Jepang dan nilai impor Indonesia dari Jepang. Faktor-faktor yang dilibatkan dalam membahas persamaan ekspor Indonesia ke Jepang adalah : GDP Jepang (JPY), GDP Indonesia (Rp), nilai ekspor (USD), Real Exchange Rate Jepang (JPY/Rp), Tarif BM Jepang (%) tahun 2005 – 2009 dan pemberlakuan IJEPA. Sementara faktor-faktor yang dilibatkan dalam membahas persamaan impor Indonesia dari Jepang adalah GDP Jepang (JPY), GDP Indonesia (Rp), nilai impor (USD), Real Exchange Rate Jepang (JPY/Rp), Tarif BM Indonesia (%) tahun 2005 – 2009 dan pemberlakuan IJEPA.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan peluang ekspor Indonesia ke Jepang sangat tergantung pada pola perdagangan Indonesia dan Jepang. Di pasar negara ini, produk Indonesia harus bersaing dengan produk negara-negara lain. Untuk itu agar nilai ekspor Indonesia ke Jepang dapat semakin meningkat, diperlukan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Jepang, salah satu diantaranya dengan memanfaatkan kesepakatan IJEPA. Sementara dengan semakin meningkatnya GDP Indonesia serta ditunjang pula oleh adanya kesepakatan IJEPA, akan meningkatkan nilai impor dari Indonesia ke Jepang.

Kata Kunci :

Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Ekspor, Impor, GDP, Tarif Bea Masuk.

ABSTRACT

Name : Ibnu Sina
Study Program : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Thesis Title : Indonesia – Japan Export and Import Analysis in the Framework of Indonesian – Japan Freetrade

This thesis is backdropped by the application of economic partnership as well as decreased rate tariff between Indonesia and Japan (IJEPA). The issue being discussed in this Thesis is to consider how far the effect of that IJEPA application to the trade value between Indonesia and Japan.

This thesis is Indonesia – Japan export import analysis in the framework of Indonesia – Japan freetrade (IJEPA) using regression equation model approach in order to consider the relation between export and import (as dependent variable) and GDP of Indonesia and Japan, exchange rate of JPY to Rupiah, and the application of IJEPA (as independent variable) with the source from secondary quantitative data collection.

This study discusses the factors related to Indonesian export value to Japan and Indonesian import value from Japan. The factors involved in discussing Indonesian export equation to Japan are Japan GDP (JPY), Indonesian GDP (Rp), export value (USD), Japan Real Exchange Rate (JPY/Rp), Japan Tariff Rate (%) in 2005 – 2009 and the application of IJEPA. As for the factors involved in discussing Indonesian import equation from Japan are Japan GDP (JPY), Indonesian GDP (Rp), import value (USD), Japan Real Exchange Rate (JPY/Rp), Indonesian Tariff Rate (%) in 2005 – 2009 and application of IJEPA.

The results of analysis show that as a whole the export opportunity of Indonesia to Japan depends on Indonesian – Japan trade pattern. In the market this country has Indonesian products must be competitive with the products from other countries. For that reason, in order for Indonesian export value to Japan may increase, it takes the government efforts in continuously improving its trade cooperation with Japan, one of IJEPA agreement. Meanwhile, the increasing increase of Indonesian GDP and also supported by the existence of IJEPA, they will improve the import value from Indonesia to Japan.

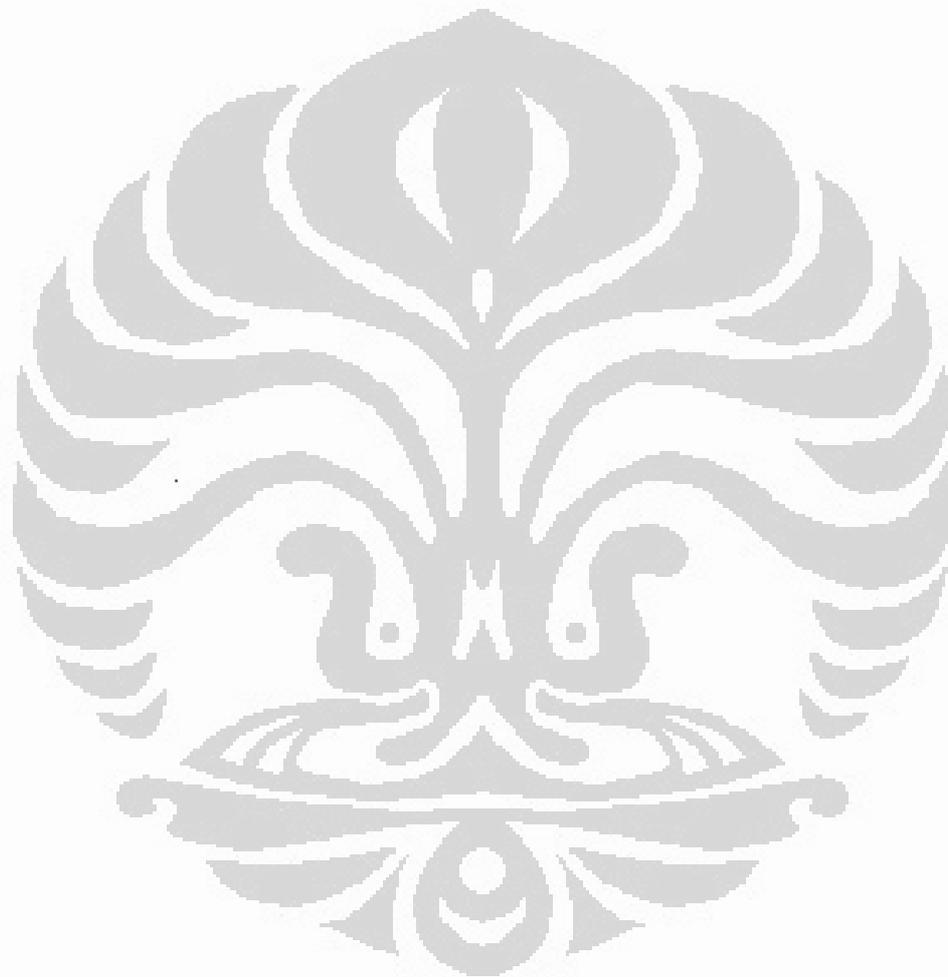
Keywords:

Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Export, Import, GDP, Tariff Rate

DAFTAR ISI

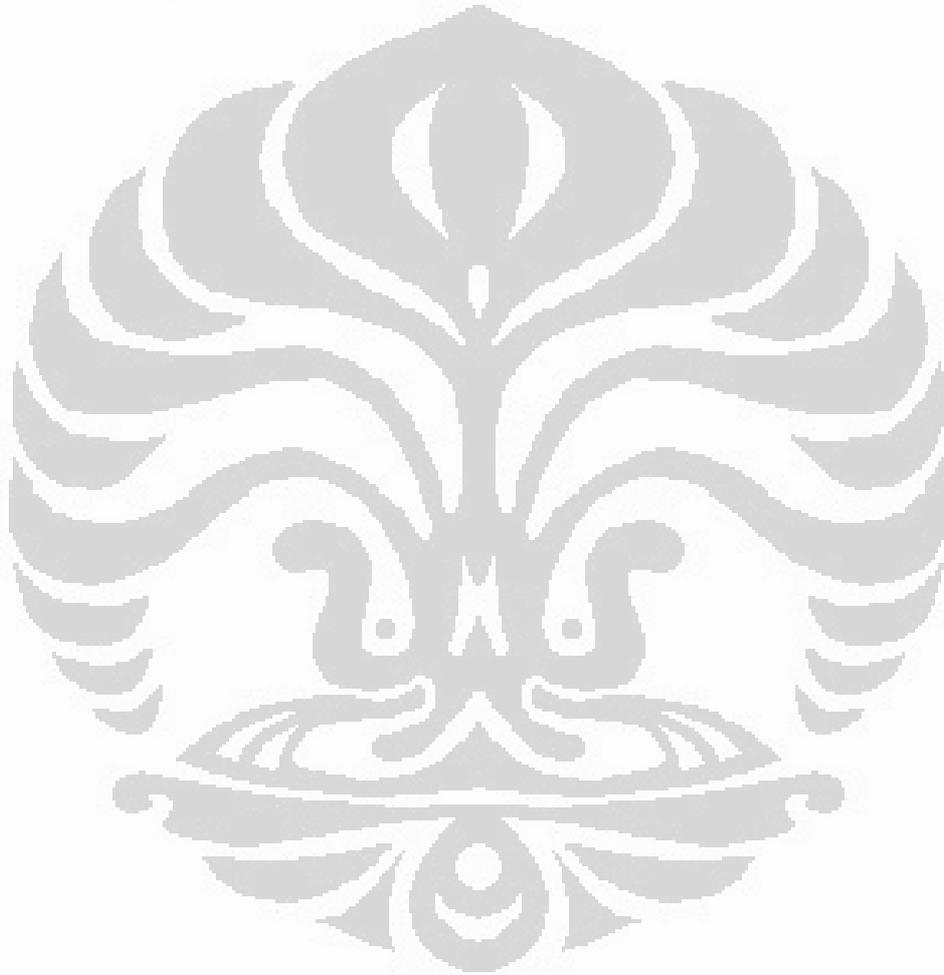
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.5 Metodologi Penelitian.....	6
2. LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori Perdagangan Internasional.....	9
2.2 Liberalisasi Perdagangan	13
2.3 Teori Integrasi Ekonomi.....	15
2.4 Tarif dan Kuota Impor.....	19
2.3 Penelitian Empiris Terdahulu.....	20
3. MODEL DAN METODOLOGI	24
3.1 Pembentukan Model.....	24
3.2 Metode Analisis.....	26
3.3 Spesifikasi Model.....	26
3.4 Metode Estimasi.....	27
4. INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP	29
 AGREEMENT (IJEPA)	
4.1 Sejarah IJEPA	29
4.2 Indonesia – Japan Economic Partnership.....	30
Agreement (IJEPA)	
4.3 Keuntungan Yang Diharapkan Dengan.....	36
Disepakatinya IJEPA	
5. PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
5.1 Analisa Data Nilai Ekspor Dan Impor.....	39
5.1.1 Ekspor Indonesia ke Jepang	39
5.1.2 Impor Indonesia dari Jepang	49
5.2 Hasil Penghitungan Untuk Ekspor.....	58
(Dari Indonesia ke Jepang)	
5.3 Hasil Penghitungan Untuk Impor.....	62
(Dari Jepang ke Indonesia)	

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	65
6.1 Kesimpulan Ekspor Indonesia ke Jepang.....	65
6.2 Kesimpulan Impor Indonesia dari Jepang.....	65
6.3 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

1.1	Ekspor ASEAN ke Jepang, 2005.....	3
1.2	Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Tahun 1990 - 2007.....	4
2.1	Konsep dan Penelitian tentang IJEPA.....	21
2.2	Konsep dan Penelitian tentang Liberalisasi Perdagangan.....	22
5.1	Hasil Output (Ekspor) Eviews 4.0.....	59
5.2	Hasil Output (Impor) Eviews 4.0.....	61



DAFTAR GAMBAR

5.1	Nilai Ekspor Produk Agri Industri	40
5.2	Nilai Ekspor Produk Kehutanan dan Hasil Hutan	41
5.3	Nilai Ekspor Produk Perikanan	42
5.4	Nilai Ekspor Produk Bahan Makanan dan Minuman	43
5.5	Nilai Ekspor Produk Tembakau dan Hasil Tembakau.....	44
5.6	Nilai Ekspor Produk Tekstil	45
5.7	Nilai Ekspor Produk Alas Kaki, Tutup Kepala.....	45
5.8	Nilai Ekspor Produk Kayu, Pulp dan Kertas	46
5.9	Nilai Ekspor Produk Kimia	47
5.10	Nilai Ekspor Produk Furniture	48
5.11	Nilai Impor Produk Bahan Kimia Anorganik.....	50
5.12	Nilai Impor Produk Bahan Kimia Organik.....	51
5.13	Nilai Impor Aneka Produk Kimia.....	52
5.14	Nilai Impor Plastik dan Barang dari Plastik.....	53
5.15	Nilai Impor Karet dan Barang dari Karet.....	54
5.16	Nilai Impor Barang dari Batu, Mika atau Semen.....	54
5.17	Nilai Impor Kaca dan Barang dari Kaca.....	55
5.18	Nilai Impor Besi dan Baja.....	56
5.19	Nilai Impor Barang dari Besi atau Baja.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Persamaan Ekspor Hasil Output Eviews 4
- Lampiran 2 Persamaan Impor Hasil Output Eviews 4
- Lampiran 3 Data Ekspor Indonesia ke Jepang
- Lampiran 4 Data Impor Indonesia dari Jepang
- Lampiran 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.11/2008
- Lampiran 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.11/2008
- Lampiran 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.11/2008



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara dengan negara lainnya mempunyai beberapa perbedaan, yaitu diantaranya sumber daya alam, iklim, letak geografis, penduduk, keahlian sumber daya manusia, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi, teknologi, sosial, politik dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya produksi yang dibutuhkan, serta mutu dan kuantitasnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan terjadilah perdagangan internasional.

Perdagangan internasional dilakukan karena dua alasan utama yang menjadi sumber bagi adanya keuntungan perdagangan (*gains from trade*) bagi masing-masing negara. Pertama, perdagangan dilakukan karena setiap negara berbeda satu dengan lainnya. Keuntungan perdagangan diperoleh dari perbedaan-perbedaan diantara negara-negara tersebut dengan mekanisme yang baik, sehingga setiap negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut. Kedua, perdagangan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis (*economies of scale*) dalam produksi, sehingga setiap negara bisa membatasi kegiatan produksinya untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu saja, dan setiap negara dapat memusatkan sumber dayanya untuk dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan lebih efisien dibandingkan apabila harus memproduksi berbagai jenis barang secara sekaligus.

Namun perkembangan perekonomian dunia yang begitu pesat telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan menambah tajam tingkat persaingan. Hal ini merupakan tantangan, kendala dan peluang bagi setiap negara untuk menyesuaikan dan memanfaatkan keadaan tersebut. Perubahan dan perkembangan perekonomian dunia tersebut bersifat mendasar dan mempunyai kecenderungan jangka panjang, dan terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang kemudian turut

mempengaruhi tata hubungan perekonomian antar negara. Perkembangan tersebut kemudian lazim disebut sebagai Globalisasi.

Perubahan akibat globalisasi tersebut, khususnya di bidang perdagangan telah membuat sebagian besar negara di dunia ini melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek perdagangan internasional, yang sebagian cenderung bersifat proteksionistis dalam rangka memperbaiki daya saing perekonomiannya.

Untuk itu, dalam rangka hubungan perdagangan internasional, berbagai upaya perbaikan dilaksanakan, diantaranya melalui perundingan perdagangan sejumlah negara, agar sistem perdagangan dunia membawa manfaat bagi negara yang berdagang dan dunia secara keseluruhan, yaitu dengan terciptanya perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sebagian besar negara di dunia sepakat melakukan liberalisasi perdagangan internasional melalui perundingan dalam berbagai forum baik multilateral, regional maupun bilateral.

Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran arah negosiasi kerja sama perdagangan dari multilateral ke regional dan bilateral dalam kerangka *Free Trade Agreement (FTA)* ataupun *Economic Partnership Agreement (EPA)*. Pembentukan FTA dan EPA dapat dilakukan secara bilateral, misalnya antara Indonesia dengan China, Indonesia dengan Jepang, Jepang dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile dan secara regional seperti *North America Free Trade Area (NAFTA)*, *European Union (EU)* dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang diantara FTA lainnya yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

Latar belakang dari kesepakatan IJEPA adalah salah satunya karena selama periode 2000-2007, *share* perdagangan Indonesia dengan Jepang cenderung menurun, antara lain ditunjukkan dari data ASEAN-Japan Center 2005, bahwa dari total ekspor ASEAN ke Jepang, porsi Indonesia untuk hampir semua produk jauh lebih kecil. Bahkan untuk komoditas pertanian, yang mana Indonesia merupakan negara agraris terbesar di ASEAN, ternyata eksportnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya jauh dibawah, misalnya, Thailand. Demikian pula atas produk-produk manufaktur tertentu, posisi Indonesia paling lemah (sebagaimana Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Ekspor ASEAN ke Jepang, 2005 (juta yen).

Negara anggota	Buah-buahan	Sayur-sayuran	Sereal	Daging	Ikan	Manufaktur	Bahan bakar mineral	Mesin non-listrik	Mesin listrik	Bahan baku
Filipina	71.352	2.213	-	574	-	-	-	128.689	393.187	65.692
Thailand	10.055	13.926	17.272	54.501	108.021	177.854	-	272.204	429.881	112.961
Vietnam	-	2.752	4.558	-	85.934	-	-	-	-	-
Indonesia	1.479	1.555	1.084	16	80.760	288.208	1.182.520	63.250	134.380	353.660
Malaysia	-	-	1.531	-	-	148.100	537.051	126.508	459.066	91.172
Singapura	-	-	2.103	18	-	-	-	204.410	147.031	-
Brunei	-	-	-	-	-	-	252.402	-	-	-

Sumber: *database* ASEAN-Japan Center.

Demikian pula *share* maupun nominal realisasi investasi dari Jepang menunjukkan kecenderungan menurun. Salah satu indikator dapat dilihat pada perkembangan jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan jumlah proyek penanaman modal asing (PMA), atau FDI (*foreign direct investment*), yang terealisasi sebagaimana pada Tabel 1.2. Berdasarkan jumlah proyek, setelah tahun 2005, PMA cenderung menurun. Ini menandakan bahwa Indonesia cenderung semakin tidak menarik bagi PMA.

Dalam kawasan ASEAN, Indonesia pun masih tertinggal dengan dengan negara-negara utama ASEAN lainnya seperti Malayssia, Thailand dan Singapura, khususnya dalam menarik PMA dari luar ASEAN (ASEAN-ekstra). Bahkan menurut *database* dari Sekretariat ASEAN, untuk periode 2005-2006, persentase pertumbuhan arus masuk neto PMA ke Indonesia negatif dibandingkan negara-negara anggota lainnya, terkecuali Myanmar.

Ini merupakan suatu masalah serius bagi Indonesia, karena dalam penerapan AFTA, Indonesia juga sekarang ini menghadapi tantangan sebagai negara tujuan investasi ASEAN. Dengan pasar tunggal ASEAN, maka produsen-produsen internasional tidak harus mempunyai pabrik di setiap negara untuk dapat mensuplai produknya ke negara-negara ASEAN. Mereka dapat memilih satu negara di kawasan ini untuk dijadikan basis produksinya. Tentunya negara yang dipilih sebagai negara basis produknya adalah negara yang dianggap paling menguntungkan dalam arti produksinya paling efisien. Sayangnya, Indonesia tampaknya masih tertinggal dalam menciptakan daya tarik untuk dijadikan pusat produksi.

Tabel 1.2. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN di Indonesia
Tahun 1990 –2007

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Nilai (Rp. Miliar)	Proyek	Nilai (juta dollar AS)
1990	253	2.398,6	100	706,0
1991	265	3.666,1	149	1.059,7
1992	225	5.067,4	155	1.940,9
1993	304	8.286,0	183	5.653,1
1994	582	12.786,9	392	3.771,2
1995	375	11.312,5	287	6.698,4
1996	450	18.609,7	357	4.628,2
1997	345	18.628,8	331	3.473,4
1998	296	16.512,5	412	4.865,7
1999	248	16.286,7	504	8.229,9
2000	300	22.038,0	638	9.877,4
2001	160	9.890,8	454	3.509,4
2002	108	12.500,0	444	3.091,2
2003	120	12.247,0	571	5.450,6
2004	130	15.409,4	546	4.602,3
2005	214	30.665,0	909	8.914,6
2006	164	20.788,4	867	5.977,0
2007	124	32.875,7	775	8.544,4

Sumber: BKPM

Hal sebagaimana diatas yang membuat kesepakatan antara dua negara (Indonesia dan Jepang) dan ditandatangani Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007. Kesepakatan IJEPA ini diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).

IJEPA adalah persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi. Tujuan dari IJEPA adalah untuk meningkatkan perdagangan dan investasi karena terjadinya penurunan pada realisasi investasi antara Indonesia dan Jepang. Berdasarkan *framework agreement*, telah disepakati dua macam skema penurunan tarif Bea Masuk dalam rangka IJEPA ini, yaitu skema tarif preferensi umum dan skema tarif *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS).

Dengan diterapkannya persetujuan kemitraan ekonomi serta penurunan tarif bea masuk antar Indonesia dan Jepang ini tentu saja menimbulkan dampak berupa *trade creation dan trade diversion*, sehingga diharapkan akan meningkatkan perdagangan antar Indonesia dengan Jepang. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari peningkatan perdagangan adalah dengan melihat peningkatan nilai ekspor atau nilai impor antara Indonesia dengan Jepang.

Bagi Indonesia, diharapkan Jepang akan membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia, *capacity building* untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta investasi industri pendukung. Namun tentunya dalam suatu perdagangan, keuntungan harus seimbang dengan apa yang diperoleh mitranya. Untuk itu, dengan adanya IJEPA ini Jepang mengharapkan Indonesia akan membuka akses pasar bagi produk-produk Jepang, penghapusan tarif, peningkatan *competitiveness* dan mengamankan posisi di pasar ASEAN.

Peningkatan nilai ekspor tentu saja merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap negara karena akan meningkatkan cadangan devisanya dan tentu saja menggerakkan perekonomian di negara tersebut. Pada sisi lain, peningkatan nilai impor yang diakibatkan adanya penurunan tarif di negara itu berada sebenarnya juga menguntungkan negara tersebut, karena hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan di negara tersebut bisa mendapatkan barang impor dari negara yang telah memiliki kesepakatan dengan total biaya yang lebih rendah dari sebelumnya, sehingga biaya produksi yang ditimbulkan menjadi lebih murah yang pada akhirnya akan menghasilkan produk jadi dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan bahwa IJEPA akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta investasi kedua negara. Di sisi lain, bahwa kerjasama tersebut akan meningkatkan arus perdagangan, pengurangan tarif dan penghapusan hambatan perdagangan yang akan menuju kepada kesejahteraan kedua belah pihak. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini akan melihat nilai perdagangan Indonesia (ekspor dan impor) dengan Jepang sebelum diterapkannya IJEPA, kemudian melakukan perbandingan antara nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang setelah diterapkan IJEPA dengan hasil peramalan nilai perdagangan jika IJEPA tidak diterapkan. Hal ini

untuk melihat seberapa besar IJEPA dapat memberikan percepatan ekspor dan impor Indonesia ke dan dari Jepang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah sejauh mana pengaruh penerapan IJEPA terhadap nilai perdagangan antara Indonesia dengan Jepang.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh penerapan IJEPA terhadap nilai perdagangan antara Indonesia dengan Jepang. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar Indonesia memperoleh manfaat dari penerapan IJEPA.

1.4. Ruang Lingkup

Untuk lebih mempertajam analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka penelitian ini terbatas pada ruang lingkup kesepakatan perdagangan antara Jepang dan Indonesia yang tertuang di dalam IJEPA, dan menganalisis peran dan manfaat pada kedua negara tersebut dalam IJEPA.

Dalam penelitian ini, yang akan diteliti hanya mencakup perdagangan beberapa barang antara Indonesia dengan Jepang. Hal ini mengingat dalam rangka implementasi skema preferensi tarif Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang (IJ-EPA), telah disepakati jadwal penurunan/penghapusan tarif secara bertahap terhadap beberapa barang dari Negara Jepang dan Indonesia dalam rangka persetujuan IJ-EPA.

1.5. Metodologi Penelitian

1. Pengumpulan Data

Dengan menggunakan data sekunder, yaitu melakukan *research* (penelitian) kepustakaan dari perjanjian/kesepakatan IJEPA, literatur-literatur, data statistik perdagangan bilateral Indonesia dengan Jepang (BKPM, BPS, BI, Japan Customs dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dan juga laporan-laporan hasil pertemuan Tingkat Kepala Negara, Tingkat Menteri ataupun *Senior Official Meeting (SEOM)*.

2. Pengolahan Data

Untuk melihat apakah terjadi peningkatan nilai impor dan ekspor antara Indonesia dengan Jepang dilakukan dengan cara membandingkan nilai transaksi perdagangan yang dimulai dari bulan Januari tahun 2005 hingga bulan Juni tahun 2009 dengan nilai perdagangan aktual yang terjadi. Analisa tersebut akan dilihat dalam konteks perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Melalui pengolahan data tersebut dapat diketahui peran dan manfaat yang diperoleh kedua negara sebelum dan pasca IJEPA.

Analisa tersebut akan dilihat dalam konteks perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang pada masing-masing komoditi barang. Pada tulisan ini penulis menggunakan model persamaan regresi untuk melihat hubungan antara ekspor dan impor (sebagai *variable dependent*) dengan GDP Indonesia dan Jepang, nilai tukar Rupiah terhadap JPY, dan pemberlakuan IJEPA (sebagai *variable independent*). Parameter yang digunakan beserta metodenya adalah sebagai berikut:

Untuk Ekspor Indonesia

$$XPOR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 GDPJ_{it} + \alpha_2 KURS_{it} + \alpha_3 IJEPA_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots(1)$$

dimana :

XPOR = Nilai Ekspor Indonesia ke Jepang

GDPJ = GDP Jepang

KURS = Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY

IJEPA = Dummy variabel (IJEPA = 1; sebelum IJEPA = 0)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Parameter regresi berganda

ε = *error*

Untuk Impor Indonesia

$$\text{IMPOR}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{GDPI}_{it} + \alpha_2 \text{KURS}_{it} + \alpha_3 \text{IJEPA}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots(1)$$

dimana :

IMPOR = Nilai Impor Indonesia dari Jepang

GDPI = GDP Indonesia

KURS = Nilai Tukar JPY terhadap Rupiah

IJEPA = Dummy variabel (IJEPA = 1; sebelum IJEPA = 0)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Parameter regresi berganda

ε = error

Observasi terhadap perilaku unit ekonomi tidak hanya akan dilakukan di dalam waktu yang bersamaan tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Dengan demikian kita dapat mempunyai gambaran unit ekonomi tersebut dengan data *cross section* dan data *time series*. Gabungan data *cross section* dan data *time series* ini disebut data panel (*Panel pooled data*).

Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel¹. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel.

¹ Nachrowi Djalal Nachrowi dan Usman Hardius, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Grasindo, Jakarta, 2004.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Perdagangan Internasional

Berdasarkan teori perdagangan internasional, motivasi utama untuk melakukan perdagangan internasional adalah mendapatkan *gains from trade*—meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya (cost). Perdagangan internasional memberikan akses terhadap barang yang lebih murah bagi konsumen dan pemilik sumber daya (*resources*) memperoleh peningkatan pendapatan karena menurunnya biaya produksi².

Adanya perdagangan luar negeri akan memberikan dampak positif pada suatu negara berupa:

1. Sarana meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui proses pertukaran;
2. Dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang diproduksi lebih murah untuk dipertukarkan dengan barang yang dihasilkan negara lain, yang jika diproduksi sendiri biayanya mahal;
3. Akibat adanya perluasan pasar produk dan pergeseran kegiatan, suatu negara mendapat keuntungan berupa naiknya tingkat pendapatan nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output dan laju pertumbuhan ekonomi;
4. Dapat mendorong kenaikan investasi dan tabungan melalui alokasi sumber-sumber yang lebih efisien;

Selain itu, manfaat-manfaat tidak langsung lainnya seperti keinginan memproduksi barang dengan kualitas yang lebih baik, terciptanya iklim persaingan yang sehat, sarana pemasukan modal asing, meningkatkan teknologi dan sebagainya³.

Konsep perdagangan internasional yang melatarbelakangi terjadinya liberalisasi antara lain teori keunggulan komparatif dan teori factor endowments. David Ricardo menyempurnakan teori keunggulan absolut dari Adam Smith dengan mengemukakan teori keunggulan komparatif.

² Appleyard, Dennis R.; Field Jr., Alfred J. dan Cobb, Steven L, *International Economics*, MacGrow Hill/Irwin, New York, 2006.

³ Amalia, Lia, *Ekonomi Internasional*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* (1776), menjelaskan bahwa perdagangan bebas antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisit neraca perdagangan bagi mitra dagangnya. Dengan demikian, Adam Smith pada dasarnya menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan kedua belah pihak karena masing-masing negara akan lebih mengkonsentrasikan diri untuk memproduksi barang-barang yang mempunyai keunggulan mutlak (*absolute advantage*) kemudian mengekspor kelebihan barang yang diproduksinya kepada mitra dagangnya

Selanjutnya David Ricardo mengemukakan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang menyatakan bahwa yang menentukan tingkat keuntungan dalam perdagangan internasional bukan berasal dari keuntungan mutlak melainkan dari keunggulan komparatif. Apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan dengan negara lainnya dalam memproduksi dua barang, kedua negara tersebut masih dimungkinkan untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi komoditas yang *absolute disadvantage*nya lebih kecil (komoditas inilah yang disebut sebagai keunggulan komparatifnya) dan mengimpor komoditas yang *absolute disadvantage*nya lebih besar (komoditas ini sebagai ketidakunggulan komparatifnya)⁴.

Pada tahun 1920-an ekonom Swedia Eli Heckscher dan Bertil Ohlin melakukan pengembangan teori keunggulan komparatif. Heckscher-Ohlin mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan *endowment*. Perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara. Perbedaan tersebut menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang

⁴ Salvator, Dominick, *International Economics*, MacMillan Publishing Company, New York, 1993..

tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya⁵.

Kemudian pada tahun 1941 Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson menulis suatu artikel yang berjudul *Protection and Real Wages* yang menjelaskan bahwa perdagangan bebas bermula dengan suatu proses penyesuaian, terutama pada masa transisi. Untuk bisa lolos dari persaingan tersebut dilakukan dengan cara menekan biaya dan meningkatkan efisiensi sehingga dapat meningkatkan keuntungan setiap pelaku ekonomi dalam perdagangan bebas.

Teori S-S mengatakan bahwa di negara yang sedang berkembang, dimana buruh merupakan faktor produksi yang melimpah, kebijakan proteksi akan menurunkan upah riil para pekerja, terutama akan merugikan pekerja di perkotaan karena mereka tidak memperoleh keuntungan dari peningkatan permintaan jasa mereka untuk meningkatkan output barang industri yang diproteksi tersebut. Penurunan permintaan tenaga kerja untuk ekspor yang padat karya, terutama yang berkaitan dengan hasil-hasil pertanian akan bergeser secara lamban karena tenaga kerja bergerak menuju sektor industri.

Pada tahun 1980-an Schydłowsky melakukan modifikasi terhadap konsep keunggulan komparatif. Konsep keunggulan komparatif versi Ricardo dan versi H-O dinyatakan sebagai konsep keunggulan komparatif yang statis dan kurang realistis karena secara implisit mengasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam faktor produksi yang melimpah, harus adanya pasar persaingan sempurna dalam perdagangan internasional dan pasar modal internasional serta tidak terjadinya pengaruh eksternal terhadap produksi dan konsumsi.

Untuk itu Schydłowsky mengemukakan konsep keunggulan komparatif yang dinamis (*dynamic comparative advantage*) yang mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi. Perubahan yang diakomodasi adalah perubahan harga komoditas di pasar internasional, perubahan biaya domestik dari faktor-faktor produksi, perubahan teknologi yang timbul dari proses asimilasi teknologi atau *learning by doing* dan sifat *economic of scale* dalam proses produksi.

⁵ Salvator, Dominick, *International Economics*, MacMillan Publishing Company, New York, 1993..

Schydlowsky juga membuat asumsi yang realistis dalam kompetisi internasional dimana harga – harga yang terbentuk dalam pasar internasional tidak merefleksikan *social scarcities*, oleh karena pasar tidak merupakan pasar yang sempurna, tetapi berdasarkan pada faktor-faktor dinamis dan realistis dari pasar internasional.

Teori terkenal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan internasional adalah teori Rybczynski yang menjelaskan bahwa peningkatan dalam satu faktor produksi pendukung (*endowment factor*) akan menurunkan output dari barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang lain. Teori ini didasarkan pada asumsi satu atau lebih dari faktor produksi 2 x 2 dalam teknologi neoklasik dengan mobilitas faktor produksi yang sempurna, dimana suatu negara akan menerima komoditas yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar internasional.

Pada tahun 1990, Michael E. Porter dalam bukunya yang berjudul *The Competitive Advantage of Nations*, mengemukakan tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi (sumberdaya alam yang melimpah dan sumberdaya manusia yang murah) yang dimiliki suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Dalam studinya Porter menyebutkan bahwa peran pemerintah sangat mendukung dalam peningkatan daya saing selain faktor produksi yang tersedia.

Selain itu Porter mengungkapkan bahwa terdapat 4 atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional yaitu⁶:

1. Keadaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil dan prasarana.
2. Keadaan permintaan dan tuntutan mutu di dalam negeri untuk hasil industri tertentu.
3. Eksistensi industri terkait dan pendukung yang kompetitif secara internasional.
4. Strategi perusahaan itu sendiri dan struktur serta sistem persaingan antar perusahaan.

⁶ Halwani, Hendra, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, 2005.

Semakin banyak sumber daya alam sebuah negara, semakin besar permintaan domestik, semakin banyak industri pendukung atau pelengkap di suatu negara serta semakin tinggi tingkat persaingan perusahaan di suatu negara, maka semakin kuat daya saing negara tersebut di tingkat internasional.

Selain faktor-faktor tersebut, keunggulan kompetitif nasional juga masih dipengaruhi oleh faktor kebetulan (penemuan baru, melonjaknya harga, perubahan kurs dan konflik keamanan antarnegara).

2.2. Liberalisasi Perdagangan

Literatur yang membahas mengenai liberalisasi sering menyamakan liberalisasi dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara atau suatu negara sedang menjalankan kebijakan liberalisasi bila kebijakan yang diterapkan tersebut menyebabkan perekonomian semakin berorientasi ke luar (*outward-oriented*) dan juga *openness*. Maksud dari kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan.

Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor (Santos-Paulino, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Krueger (1978) dan Bhagwati (1978) merupakan studi terorganisir pertama untuk menformalkan klasifikasi dari kebijakan. Mereka mengartikan kebijakan liberalisasi perdagangan sebagai kebijakan yang mengurangi tingkat anti-export bias yang menitikberatkan terhadap pengurangan *import licences premium* (PR).

Orientasi kebijakan perdagangan suatu negara diukur berdasarkan tingkat struktur proteksi dan sistem insentif yang diberlakukan. Pada tahun 1987, World Bank melakukan studi tentang orientasi kebijakan perdagangan negara-negara di dunia. World Bank

mengklasifikasi negara-negara dalam kelompok berdasarkan orientasi perdagangan untuk melihat performa ekspor menjadi empat kelompok yaitu *strongly outward oriented countries*, *moderately outward oriented countries*, *moderately inward oriented countries*, *strongly inward oriented countries*. Indonesia pada periode tahun 1963-1973 masuk dalam kelompok *moderately outward oriented* sedangkan pada tahun 1973-1985 menjadi *moderately inward oriented*. World Bank menyimpulkan bahwa negara yang tergolong *outward oriented* memiliki performa lebih baik daripada negara yang tergolong *inward oriented*.

Dilihat dari sudut pandang teori kebijakan, teori tentang kebijakan menyatakan bahwa hambatan perdagangan menyebabkan distorsi bagi perekonomian yang menyebabkan pada misalokasi sumber daya di dunia. Distorsi semakin besar jika negara yang menerapkannya adalah negara kecil yaitu negara yang tidak dapat mempengaruhi perilaku negara lain melalui kebijakan-kebijakannya. Dibalik alasan untuk memproteksi industri-industri baru di dalam negeri, hambatan dalam perdagangan tetap mendatangkan distorsi.

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh negara maka dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kebijakan substitusi impor atau ekspansi ekspor. Substitusi impor sering dikaitkan dengan kebijakan proteksi dan ekspansi ekspor berhubungan dengan kebijakan liberalisasi. Pada prakteknya, kebijakan proteksi dengan meningkatkan tarif misalnya sulit dilakukan.

Suatu negara yang berencana untuk memberlakukan hambatan perdagangan seperti tarif misalnya harus mempertimbangkan efek timbal balik jika negara lain melakukan hal yang sama (Nenci dan Pietrobelli, 2007). Kebijakan dalam rangka liberalisasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang dilakukan secara global dan unilateral, dan yang dilakukan secara bilateral atau regional. Kebijakan yang berlaku global berkaitan dengan kesepakatan yang diputuskan di WTO dan yang unilateral adalah kebijakan yang secara sepihak dilaksanakan oleh negara tersebut. Kebijakan regional atau bilateral adalah kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan secara bilateral atau regional yang biasanya berada dalam suatu perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional.

Konsep kebijakan yang diterapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen. Komponen pertama adalah indikator dari kebijakan liberalisasi yang dapat dikuantifikasi yaitu pajak ekspor dan bea masuk. Komponen kedua adalah indikator yang menandakan tahun diberlakukannya kebijakan liberalisasi tersebut. Penelitian empiris tentang pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap perkembangan ekspor yang dilakukan oleh Bleaney (1999) dan Santos-Paulino (2002) menggunakan model panel data menunjukkan bahwa liberalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan ekspor. Pajak ekspor memberikan pengaruh kurang signifikan sebaliknya perubahan harga dan pertumbuhan pendapatan dunia berpengaruh signifikan.

Fainy et. al. (1992) menganalisis pengaruh kebijakan perdagangan terhadap impor dan merekomendasikan agar dalam meneliti perkembangan impor memasukkan variabel kebijakan liberalisasi. Berbeda dengan pengaruh pajak ekspor terhadap perkembangan ekspor, penelitian Santos-Paulino (2002) menunjukkan bahwa tarif bea masuk signifikan mempengaruhi perkembangan impor namun besarnya tergantung pada rezim kebijakan masing-masing negara dan penghapusan hambatan perdagangan mendatangkan pengaruh positif terhadap impor.

Penelitian Santos-Paulino dan Thirwall (2002) terhadap 22 negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, Asia Timur dan Selatan menunjukkan bahwa penurunan tarif/bea masuk impor mempengaruhi pertumbuhan impor. Kebijakan liberalisasi perdagangan diukur dengan dua cara yaitu pajak ekspor dan tarif bea masuk serta variabel dummy yang menandakan tahun berlakunya kebijakan liberalisasi di masing-masing negara. Hasil penelitian adalah kebijakan perdagangan yang lebih liberal meningkatkan pertumbuhan ekspor dan impor namun peningkatan pertumbuhan impor lebih tinggi daripada ekspor.

2.3. Teori Integrasi Ekonomi

Dalam usaha untuk meningkatkan ekonominya masing masing, maka setiap negara mengadakan kerjasama ekonomi regional. Bentuk, sistem dan pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan bisa mengambil jenis-jenis kerjasama secara beragam yang biasanya didasarkan pada kondisi politik, sosial ekonomi dan fisik.

Ada tiga alasan pokok yang dipercayai melandasi kebijakan liberalisasi total perdagangan luar negeri yaitu⁷:

- a. Demi menghindarkan berkembangnya *X-inefficiency*. Kebijakan liberalisasi perdagangan internasional diharapkan akan mampu mendorong berlangsungnya proses rasionalisasi industri, bersamaan dengan proses alokasi manajemen ekonomi yang optimal.
- b. Demi menghindari atau meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro yang menjurus kepada timbulnya apa yang disebut *stop-go macroeconomics cycle*. Kebijakan proteksi yang disertai oleh adanya kurs mata uang yang tidak realistis cenderung akan mengakibatkan terjadinya *foreign exchange bottlenecks*.
- c. Demi mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan memperluas produksi untuk ekspor. Liberalisasi perdagangan internasional diantisipasi akan menimbulkan situasi produksi yang berciri *increasing return to scale*.

Kebijakan liberalisasi juga dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor⁸.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan akan mendatangkan static gains berupa alokasi sumber daya pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih besar sehingga dapat menghindari distorsi yang disebabkan oleh kebijakan proteksi. Untuk itu, suatu negara yang berencana untuk memberlakukan hambatan perdagangan seperti tarif misalnya harus memperhitungkan efek timbal balik jika negara lain melakukan hal yang sama⁹.

Perdagangan bebas memberikan kesempatan bagi semua perekonomian untuk mengkhususkan diri dalam hal yang paling dikuasainya, menjadikan warga negara di seluruh dunia lebih sejahtera. Pembatasan perdagangan merusak manfaat-manfaat yang

⁷ Halwani, Hendra, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, 2005

⁸ Santos-Paulino, Amelia U, *Trade Liberalization and Economic Performance: Theory and Evidence for Developing Countries*, The Economic Journal, Balckwell Publishing, UK.

⁹ Nenci S. dan Pietrobelli, C., *Does Tariff Liberalization Promote Trade?* Working Paper CREI No.4., University of Rome, Rome.

diperoleh dari perdagangan ini, sehingga mengurangi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan¹⁰.

Walaupun demikian masih terdapat berbagai macam argumen yang mendukung dibatasinya perdagangan internasional yaitu bahwa lapangan kerja domestik perlu dilindungi, keamanan nasional harus dijaga, industri kecil harus dibantu bertumbuh, kompetisi tidak adil harus dihindarkan, dan pembatasan perdagangan dapat digunakan sebagai alat tawar menawar dalam menghadapi pihak asing. Meskipun sebagian dari alasan-alasan ini dapat dipertanggungjawabkan, kaum ekonom yakin bahwa perdagangan bebas adalah kebijakan yang biasanya lebih baik¹¹.

Berdasarkan Teori Tahapan Integrasi Ekonomi Regional dari Bela Balassa maka proses tahapan kerjasama dan integrasi ekonomi regional adalah sebagai berikut¹²:

1. *Trade Preference Arrangement (TPA)* adalah bentuk kerja sama ekonomi regional yang masing-masing anggotanya memberikan preferensi dalam bentuk tarif (fasilitas keringanan bea masuk) dan non tarif untuk produk orisinal masing-masing negara anggota. Contohnya adalah TPA antar negara ASEAN sebelum terbentuknya AFTA dimana dalam TPA tersebut masing-masing negara anggota memberikan preferensi tarif dalam bentuk keringanan bea masuk atau tarif yang lebih murah sebesar 25% hingga 50% untuk produk orisinal yang mereka perdagangkan.
2. *Free Trade Area (FTA)* adalah suatu bentuk kerja sama ekonomi regional yang perdagangan produk-produk orisinal negara-negara anggotanya tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain "*internal tariff*" antara negara anggota menjadi 0%, sedangkan masing-masing negara mempunyai "*external tariff*" sendiri-sendiri. Contohnya *AFTA* yang diawali *CEPT*.
3. *Customs Union (CU)* adalah bentuk kerjasama ekonomi regional dengan internal tarif untuk produk-produk orisinal dari/ke masing-masing negara anggota yang besarnya 0% atau dibebaskan dari bea masuk dan external tarif untuk produk yang berasal dari negara bukan anggota untuk seluruh negara anggota adalah sama.

¹⁰ Mankiw Gregory N, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.

¹¹ Mankiw Gregory N, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.

¹² Hady, Hamdy, *Ekonomi Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

4. *Common Market (CM)* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kebebasan bergerak untuk faktor produksi dari/ke masing-masing negara anggota. Contohnya *European Common Market*, *CACM (Central American Common Market)*, *Caricom (Caribbean Community and Common Market)*.
5. *Economic Union (EU)* adalah bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerja, jaminan sosial dll.
6. *Monetary Union (MU)* adalah bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan / persamaan mata uang. Contohnya *European Community* yang memiliki mata uang tunggal Euro.

Seiring dengan penerapan FTA yang menurunkan tarif bea masuk antar negara anggota akan menyebabkan terjadinya *Trade Creation* dan *Trade Diversion*.

Trade creation adalah penggantian produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional melalui FTA atau CU dengan produk impor yang lebih murah dari negara anggota lain¹³. Efek positif dari *trade creation* adalah masing-masing akan melakukan spesialisasi berdasarkan *comparative advantage*, sehingga harga barang akan menjadi relatif lebih murah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk negara anggota, tetapi juga untuk negara yang bukan anggota karena harga yang menjadi lebih murah akan meningkatkan impor dari negara lain.

Trade Diversion adalah pengalihan perdagangan dari bukan dengan negara anggota menjadi perdagangan dengan negara anggota. Hal ini merupakan dampak negatif dari FTA karena barang dengan harga yang lebih murah dari bukan negara anggota FTA akan digantikan dengan impor barang yang harganya relatif lebih mahal dari negara anggota¹⁴. Hal ini dapat terjadi karena preferential tarif yang diberikan kepada sesama negara anggota, sehingga harga barang dari sesama negara anggota ditambah bea masuk menjadi relatif lebih murah. Dengan demikian, *trade diversion* dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh dari spesialisasi perdagangan internasional berdasarkan *comparative advantage*.

¹³ Hady, Hamdy, *Ekonomi Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

¹⁴ Hady, Hamdy, *Ekonomi Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Jika pembentukan FTA menyebabkan proses pengalihan produksi sehingga mengakibatkan *trade diversion* dari sumber impor yang biayanya rendah ke sumber lain yang biayanya tinggi, maka jelas pembentukan FTA tersebut mengandung nilai ekonomis yang negatif apabila dilihat dari perekonomian dunia secara keseluruhan (tetapi dari kepentingan regional tetap menguntungkan). Namun apabila ternyata hal tersebut lebih banyak membuahkan *trade creation*, maka pembentukan FTA itu membuat negara – negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan sehingga nilai ekonomisnya positif¹⁵.

2.4. Tarif Dan Kuota Impor

Secara teoritis, sebagaimana pemikiran kaum klasik maupun neo-klasik, sistem perdagangan bebas antar negara akan dapat menciptakan manfaat yang maksimal. Namun demikian, mekanisme pasar tidak selalu berjalan secara sempurna. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali terdapat campur tangan (intervensi) pemerintah yang berakibat pada munculnya distorsi pasar. Beberapa bentuk intervensi yang sering ditemukan antara lain adalah berupa pemberlakuan tarif impor, kuota impor, dan berbagai bentuk domestik support lainnya. Semua bentuk intervensi ini berdampak pada munculnya distorsi pasar.

Tarif adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap suatu produk yang masuk atau keluar dari suatu negara. Tarif yang dikenakan terhadap produk yang diimpor disebut tarif impor, sedangkan tarif yang dikenakan terhadap produk ekspor disebut dengan tarif ekspor. Secara teoritis, pajak yang berasal dari tarif memberikan pemasukan bagi pemerintah. Banyak negara yang menerapkan kebijakan pemberlakuan tarif untuk melindungi industri dalam negeri terutama untuk industri yang baru tumbuh.

Dampak pemberlakuan tarif bisa berbeda antara negara. Pada negara-negara kecil yang tidak mampu mempengaruhi harga dunia, penerapan tarif hanya akan merubah harga di negara tersebut, sementara harga dunia tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pada kasus negara besar, penerapan tarif akan mampu mempengaruhi harga dunia.

¹⁵ Krugman, Paul R and Maurice Obstfeld, *International Economics*, Fifth Edition, Pearson Education International, 2000.

Tarif impor tidak lain merupakan instrumen pajak yang dikenakan pemerintah pada barang-barang impor. Terdapat dua jenis tarif impor, yakni tarif khusus dan tarif *ad valorem*. Tarif khusus merupakan pajak tetap yang dikenakan pada setiap unit barang impor. Dengan tarif khusus sebesar Rp. 25 untuk setiap kg beras impor, maka pemerintah akan memperoleh penerimaan dari tarif sebesar Rp. 25.000 dari 1000 kg beras impor. Sementara itu, tarif *ad valorem* adalah pajak sebesar prosentase tertentu dari nilai transaksi barang yang diimpor.

Kuota impor adalah instrumen pembatasan kuantitas barang yang dapat diimpor dalam kurun waktu tertentu. Kuota impor disebut mengikat (*binding*), apabila kuantitas impor yang diperbolehkan berada di bawah kuantitas impor yang terjadi dalam perdagangan bebas. Kondisi sebaliknya berlaku untuk kuota impor yang tidak mengikat (*non-binding*). Saat ini dikenal dua jenis kuota impor, yakni kuota mutlak (*absolute quota*) dan kuota tarif (*tariff-rate quota*). Kuota mutlak membatasi kuantitas barang yang boleh diimpor dalam kurun waktu tertentu. Dengan kuota tarif, barang dalam jumlah tertentu boleh diimpor namun dengan dikenakan tarif khusus yang umumnya lebih rendah dari tarif semula.

Tarif dapat meningkatkan harga barang di negara pengimpor dan menurunkan harga barang tersebut di negara-negara pengekspor. Sebagai akibat dari perubahan harga ini, maka kalangan konsumen di negara pengimpor merugi, sedangkan para konsumen di negara pengekspor beruntung. Produsen di negara pengimpor memperoleh keuntungan, sementara produsen di negara pengekspor mengalami kerugian. Untuk membandingkan biaya dan manfaat ini, perlu dihitung secara cermat. Cara yang biasa ditempuh untuk mengukur biaya dan manfaat tarif bergantung pada dua konsep yang lazim digunakan di dalam analisis mikro ekonomi, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen.

2.5. Penelitian Empiris Terdahulu

Studi terhadap dampak kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia dilakukan oleh Feridhanusetyawan dan Pangestu (2003) menggunakan model global *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan perangkat *Global Trade Analysis Project* (GTAP) versi 3. Dalam model ini perekonomian dibagi 19 kawasan dan 12 komoditi dengan empat skenario kebijakan. Hasil studi memberikan kesimpulan bahwa

liberalisasi perdagangan menyebabkan neraca perdagangan meningkat dengan jumlah berkisar antara US\$433 juta sampai US\$450 juta tergantung pada skenario yang dijalankan. Dengan kata lain, ekspor dan impor akan meningkat namun peningkatan ekspor lebih besar daripada impor. Pada keempat skenario, ekspor Indonesia meningkat sekitar 29-37%. Indonesia mendapatkan keuntungan dari kebijakan liberalisasi yang dilakukan secara multilateral.

Studi lain yang menggunakan model CGE dengan perangkat GTAP dilakukan oleh Erika Meilani (2008), yang meneliti tentang Analisis dampak perdagangan bebas Indonesia-Jepang dengan pendekatan Global Trade Analysis Project (GTAP). Tujuan penelitiannya adalah memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak suatu perdagangan bebas antara Indonesia dengan Jepang, dan melakukan analisa pola perdagangan Jepang, pola perdagangan Indonesia, dan pola perdagangan antara Indonesia – Jepang. Dalam penelitian ini dilakukan simulasi dimana tarif impor bilateral antara kedua negara dibuat nol. Sedangkan tarif impor dari negara-negara lain ke Jepang atau ke Indonesia tidak diubah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa selain meningkat secara signifikannya kegiatan ekspor bilateral dua negara, namun ada sektor-sektor yang terpuuk oleh liberalisasi perdagangan Indonesia – Jepang.

Tabel 2.1.

Konsep dan Penelitian Tentang IJEPA

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan, Hasil penelitian dan temuan dalam penelitian	Metode	Negara
1	Meilani, Erika (2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak suatu perdagangan bebas antara Indonesia dengan Jepang; - Melakukan analisa pola perdagangan Jepang, pola perdagangan Indonesia, dan pola perdagangan antara Indonesia – Jepang. 	Analisis dengan pendekatan GTAP	Indonesia – Jepang

Sedangkan penelitian lain tentang topik liberalisasi perdagangan diantaranya terdapat satu penulisan tentang perdagangan bebas Indonesia-Korea Selatan, Analisis dampak perdagangan bebas Indonesia-Korea Selatan dalam kerangka liberalisasi perdagangan ASEAN Korea Free Trade Area (FTA), author: Tri Joelyartini, Siti, 2007. Dalam penulisan ini, analisis perdagangan Indonesia – Korea Selatan menggunakan pendekatan *Constant Market Share-CMS* dan *Panel Data Analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan komoditas ekspor Indonesia ke Korea Selatan mengalami perubahan pangsa pasar di Korea Selatan yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan daya saing.

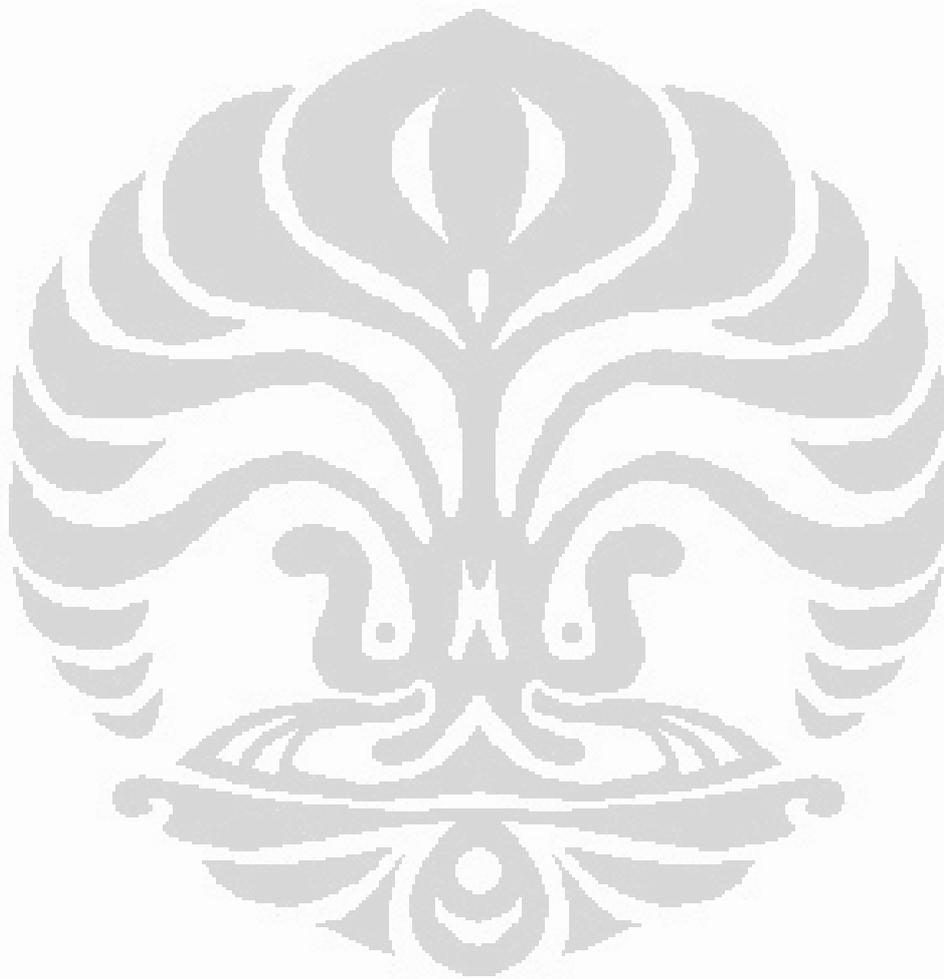
Tabel 2.2.
Konsep dan Penelitian Tentang Liberalisasi Perdagangan

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan, Hasil penelitian dan temuan dalam penelitian	Metode	Negara
1	Siti Tri Joelyartini (2007)	- Menganalisis dampak dari liberalisasi ASEAN – Korea Selatan FTA thdp perdagangan Indonesia-Korsel	Model ekonometri	Indonesia – Korea Selatan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan menyebabkan ekspansi perdagangan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan dalam perdagangan. Konsekuensi dari hal ini bukan hanya terjadi peningkatan ekspor namun terjadi juga peningkatan impor.

Dalam perekonomian terbuka, ekspor maupun impor membentuk neraca perdagangan suatu negara. Menganalisis pengaruh kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap neraca perdagangan penting karena liberalisasi perdagangan selain membuka akses pasar ke negara lain disebabkan penghapusan hambatan perdagangan, pasar domestik juga merupakan target bagi barang ekspor dari negara lain. Hampir semua negara bertujuan agar ekspor lebih besar daripada impor. Oleh sebab itu, meneliti

pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekspor dan impor di Indonesia perlu dilakukan untuk meneliti mana yang lebih responsif, ekspor atau impor ketika hambatan perdagangan telah ditiadakan.



BAB III

MODEL DAN METODOLOGI

3.1. Pembentukan Model

Ekspor berhubungan dengan permintaan luar negeri terhadap barang-barang dalam negeri. Sebagaimana halnya permintaan secara umum, permintaan ekspor dipengaruhi oleh harga relatif, dan pendapatan luar negeri. Bila terjadi peningkatan pendapatan riil Luar Negeri, maka peningkatan pendapatan tersebut akan dibelanjakan pada barang-barang Dalam Negeri dan barang ekspor, maka permintaan thdp ekspor akan meningkat.

Dalam fungsi permintaan yang dinamis, disamping harga, variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan adalah :

- a. Pendapatan konsumen;
- b. Barang pengganti;
- c. Selera;
- d. Barang saingan;
- e. Kebijakan perdagangan;
- f. Kekayaan.

Dalam teori perdagangan internasional, permintaan berasal dari negara importir dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dari sisi permintaan :

- a. Harga impor terhadap harga komoditi domestik;
- b. Pendapatan domestik bruto negara importir;
- c. barang pengganti/substitusi.

Kemudian untuk melihat apakah terjadi peningkatan nilai impor dan ekspor antara Indonesia dengan Jepang dilakukan dengan cara membandingkan nilai transaksi perdagangan yang dimulai dari bulan Januari tahun 2005 hingga bulan Juni tahun 2009

dengan nilai perdagangan aktual yang terjadi. Analisa tersebut akan dilihat dalam konteks perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Dengan pengolahan data tersebut dapat diketahui peran dan manfaat yang diperoleh kedua negara sebelum dan pasca IJEPA.

Analisa tersebut akan dilihat dalam konteks perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang pada masing-masing komoditi barang. Model persamaan regresi digunakan untuk melihat hubungan antara ekspor dan impor (sebagai variable *dependent*) dengan GDP Indonesia dan Jepang, nilai tukar Rupiah terhadap JPY, dan pemberlakuan IJEPA (sebagai variable *independent*). Parameter yang digunakan beserta metodenya adalah sebagai berikut:

Untuk Ekspor Indonesia

$$XPOR_{it} = \alpha_{0i} + \alpha_1 GDPJ_{it} + \alpha_2 KURS_{it} + \alpha_3 IJEPA_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots(1)$$

dimana :

XPOR = Nilai Ekspor Indonesia ke Jepang(USD)

GDPJ = GDP Jepang.....(JPY)

KURS = Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY

IJEPA = Dummy variabel (IJEPA = 1; sebelum IJEPA = 0)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Parameter regresi berganda

ε = *error*

Untuk Impor Indonesia

$$IMPOR_{it} = \alpha_{0i} + \alpha_1 GDPI_{it} + \alpha_2 KURS_{it} + \alpha_3 IJEPA_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots(1)$$

dimana :

IMPOR = Nilai Impor Indonesia dari Jepang(USD)

GDPI = GDP Indonesia(USD)

KURS = Nilai Tukar JPY terhadap Rupiah

IJEPA = Dummy variabel (IJEPA = 1; sebelum IJEPA = 0)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Parameter regresi berganda

ε = *error*

3.2. Metode Analisis

Jika suatu persamaan memiliki hubungan kasual yang bersifat dua arah, dalam arti bahwa misal, $Y = f(X)$ dan juga $X = f(Y)$, maka kita tidak dapat menggunakan model persamaan tunggal, tetapi kita harus membangun model persamaan simultan.

Ada dua jenis variabel dalam model persamaan simultan, yaitu : variabel endogen dan variabel yang ditentukan atau ditetapkan terlebih dahulu (predetermined variable).

Yang dimaksud dengan variabel endogen adalah suatu variabel dimana nilai-nilainya ditetapkan atau ditentukan dalam model, sedangkan variabel predetermined adalah suatu variabel yang nilai-nilainya ditentukan diluar model. Variabel predetermined di bagi kedalam dua kategori, yaitu variabel eksogen untuk nilai sekarang maupun variabel eksogen yang merupakan variabel lag dari variabel endogen (endogenous lag).

3.3. Spesifikasi Model

Sesuai dengan kerangka berfikir, maka hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang dapat dispesifikasi dalam bentuk model sistem persamaan simultan. Persamaan-persamaan yang terkandung di dalam model dapat dikelompokkan ke dalam dua persamaan, yaitu persamaan ekspor Indonesia ke Jepang dan persamaan impor Indonesia dari Jepang.

Persamaan ekspor Indonesia ke Jepang terdiri atas variabel endogen, yaitu nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Adapun variabel eksogen untuk persamaan tersebut adalah GDP Jepang, nilai tukar Rupiah terhadap JPY, dan pemberlakuan IJEP.

Sedangkan persamaan impor Indonesia dari Jepang terdiri atas variabel endogen, yaitu nilai impor Indonesia dari Jepang, dengan variabel eksogen untuk persamaan tersebut adalah GDP Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap JPY, dan pemberlakuan IJEP.

Persamaan sebagaimana tersebut diatas dapat dituliskan sebagai berikut :

Untuk Ekspor Indonesia

$$XPOR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 GDPJ_{it} + \alpha_2 KURS_{it} + \alpha_3 IJEP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Untuk Impor Indonesia

$$\text{IMPOR}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{GDPI}_{it} + \alpha_2 \text{KURS}_{it} + \alpha_3 \text{IJEPA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dalam Persamaan struktural Ekspor Indonesia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Nilai ekspor Indonesia ke Jepang dipengaruhi oleh GDP Jepang (GDPJ), Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY (KURS), dan pemberlakuan kesepakatan IJEPA (IJEPA). Ketiga variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Variabel *IJEPA* merupakan *dummy variable* untuk menangkap kondisi pemberlakuan kesepakatan IJEPA yang dimulai sejak Juli tahun 2008 ($\text{IJEPA} = 1$; sebelum $\text{IJEPA} = 0$).

Kemudian dalam persamaan struktural Impor Indonesia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai impor Indonesia dari Jepang. Nilai impor Indonesia dari Jepang dipengaruhi oleh GDP Indonesia (GDPI), Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY (KURS), dan pemberlakuan kesepakatan IJEPA (IJEPA). Variabel GDPI dan IJEPA diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai impor Indonesia dari Jepang, sementara variabel KURS diduga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap nilai impor Indonesia dari Jepang.

Setiap variabel yang ada dalam model, kecuali variabel *dummy*, dispesifikasi dalam bentuk logaritma. Bentuk pengaruh variabel *dummy* terhadap variabel endogen dapat melalui intersep dan/atau melalui koefisien regresi (*slope*) variabel penjelas tertentu. Untuk bentuk pengaruh terakhir, variabel *dummy* bersangkutan diinteraksikan dengan variabel penjelas yang dipandang relevan.

3.4. Metode Estimasi

Pendekatan yang digunakan untuk menduga atau mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel (*pooling cross section-time series regression*). Dalam pendekatan ini, data disusun dalam bentuk *gabungan*, yaitu kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Keuntungan pendekatan ini, antara lain:

- a. untuk mengendalikan keheterogenan individu, dalam konteks penelitian ini yaitu produk/barang impor/ekspor;

- b. memberikan informasi yang lebih kaya, *less collinerity* diantara variabel-variabel penjelas, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien;
- c. data panel lebih baik untuk mengidentifikasi dan mengukur *effect* yang tidak bisa dideteksi dalam model data *cross section* atau *time series*, dan
- d. data panel sangat sesuai untuk mempelajari dan menguji perilaku model yang kompleks dibandingkan model data *cross section* atau data *time series*.

Berbeda dengan model regresi yang biasanya diestimasi dengan teknik kuadrat terkecil biasa (*ordinary least squares*), kebanyakan estimasi regresi data panel mengasumsikan $u_{it} = \mu_i + v_{it}$ dimana μ_i merupakan *unobservable individual specific effect*. Berkenaan dengan spesifikasi μ_i , ada dua model untuk panel data yaitu *fixed effect* dan *random effect*. Spesifikasi model *fixed effect* digunakan jika kita hanya menerapkan model tersebut hanya untuk *cross-sectional unit* yang tercakup dalam studi kita. Sementara itu, spesifikasi *random effect* digunakan jika *cross-sectional unit* yang digunakan dalam studi merupakan *sample* yang diambil dari populasi yang besar (Greene, 2000; Baltagi, 1995).

Dalam penelitian ini, karena unit analisis (observasi) adalah produk/barang ekspor/impor IJEPa dan semua produk/barang ekspor/impor IJEPa menjadi *sample cross sectional* dalam studi ini, maka metode estimasi yang akan digunakan adalah metode yang dipandang sesuai dengan spesifikasi *fixed effect*.

BAB IV
INDONESIA - JAPAN
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

4.1. Sejarah IJEPA

IJEPA merupakan pengalaman pertama kali bagi Indonesia ikut terjun dalam kancah perundingan perdagangan Internasional dalam forum bilateral. Perundingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Jepang yang menyatakan pentingnya EPA bagi pengembangan ekonomi kedua negara.

Sementara itu bagi Jepang, perundingan EPA sudah dilakukan dengan beberapa negara yaitu dengan tiga negara sudah ditandatangani yaitu Singapura, Mexico dan Malaysia, serta beberapa negara yang sampai saat ini masih berlangsung perundingannya, yaitu Korea Selatan, Thailand dan Philipina.

Terdapat tiga alasan pokok bagi Jepang dalam merintis dan mengembangkan EPA saat ini yaitu alasan ekonomi, keamanan serta politik dan diplomasi internasional. Dari perspektif ekonomi, titik berat perhatiannya adalah mendorong perdagangan bebas. Dari sisi keamanan, perkembangan globalisasi pasca perang dingin memberi dampak terhadap ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Dari sudut pandang politik dan diplomasi internasional, EPA diharapkan menjadi wahana bagi Jepang dalam upaya memperkuat konsolidasi jejaring kemitraan, khususnya terhadap negara-negara mitra di tingkat regional sebagai bagian komunitas internasional.

Sebelum dilakukan perundingan perdagangan bilateral diawali dengan melakukan Joint Study Group untuk mendapatkan gambaran apakah EPA diperlukan karena akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara. Dalam perundingan IJEPA dilakukan secara bergiliran di Indonesia dan Jepang setiap 3 bulan sekali, dan dikelompokkan dalam beberapa Expert Group (EG), yaitu EG Trade in goods, EG On Investment, EG in Trade on services, EG Movement Natural Person, EG on Rule of Origin, EG on Customs, EG on Government Procurement, EG on Competitive Policy,

EG on Cooperation, EG on Energy Mineral Resources, dan EG on Intellectual Property Rights.

4.2. *Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement merupakan kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang mencakup 11 bidang atau kelompok perundingan yaitu (1) Trade in Goods, (2) Rules of Origin (RoO), (3) Customs Procedures, (4) Trade in Services, (5) Investment, (6) Movement of Natural Persons, (7) Government Procurement, (8) Intellectual Property Rights, (9) Competition Policy, (10) Energy and Mineral Resources, dan (11) Cooperation.

Kelebihan Skema IJEPA dibanding dengan FTA-FTA lainnya yang pernah ditandatangani Indonesia yakni dalam skema ini tidak hanya mengatur modalitas penurunan tarif namun mengatur juga fasilitas bea masuk untuk barang yang diimpor langsung dari Jepang untuk empat sektor industri yakni otomotif kendaraan bermotor, elektronik, konstruksi dan energi.

Sesuai ketentuan dalam UU No.10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17/2006, Menteri Keuangan menetapkan tarif bea masuk yang berlaku umum dengan memperhatikan UU No.7/1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Menteri Keuangan juga menetapkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Sedangkan struktur tarif di Indonesia saat ini, tarif bea masuk yang saat ini dikenakan adalah *Applied Tariff* ada skema Umum (MFN/*Most Favored Nations*) yang tidak boleh melebihi *WTO Bound Tariff* (Di Dalam *WTO Bound Tariff: Non Agriculture Market Access* dan *Agriculture*), serta Preferensi yang tidak melebihi MFN yang sudah diimplementasi: CEPT-AFTA, ASEAN China FTA, ASEAN Korea FTA, Indonesia Japan-EPA yang segera implementasi: ASEAN Australia New Zealand FTA dan Sedang negosiasi: ASEAN India FTA, ASEAN Japan-CEP, ASEAN EU FTA, Indonesia-Iran, Indonesia-Pakistan, D8, GSTP, dll.

Untuk liberalisasi Perdagangan Barang (*Trade in Goods/ TIG*) diatur pada *Chapter 2* dari *EPA Agreement*, yaitu ketentuan yang mengatur Modalitas Indonesia dan Jepang, serta Modalitas dengan Catatan untuk Indonesia, Modalitas dengan Catatan untuk Jepang, penetapan/penurunan tarif bea masuk melalui *fast-track* (Kategori A), penetapan/penurunan tarif bea masuk bertahap (Kategori B dan P dengan catatan), dan pengecualian (Kategori X).

KATEGORI	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
A	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi.
B3	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B5	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B7	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B10	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B15	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
X	Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN.
P	Tarif Bea Masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan.

Keterangan :

A : Tarif BM nya 0% pada tahun 2008;

B3 : Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun;

B5: Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun;

B7 : Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun;

B10 : Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun;

B15 : Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun;

X : Dikecualikan dari penurunan tarif bea masuk, berlaku tarif MFN;

P : Tarif bea masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan.

Preferensi Umum tertuang dalam PMK Nomor 94/PMK.11/2008 mengatur modalitas penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam rangka IJ-EPA dan PMK Nomor 95/PMK.11/2008 yang mengatur penetapan tarif bea masuk dalam rangka IJ-EPA. Dalam preferensi umum ini diatur tarif BM ditetapkan untuk 5 tahun dengan ketentuan untuk tahun pertama sejak 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2009 dan tahun selanjutnya perubahan tarif dimulai dari awal Januari sampai 31 Desember 2012. Dalam Lampiran PMK itu pula berisi Tarif Bea Masuk IJ-EPA berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang HS 2007 sedangkan dalam Lampiran II-nya berisi Tarif Bea Masuk IJ-EPA berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang HS 2002/AHTN/NASIONAL 2004 serta Penjelasan Lampiran II berisi Daftar Uraian Barang pada Pos Tertentu berdasarkan HS 2002/AHTN/NASIONAL 2004.

Sedangkan untuk Preferensi khusus diatur dalam PMK nomor: 96/PMK.11/2008 yaitu ketentuan tentang penetapan tarif bea masuk skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS). Tarif BM ditetapkan menjadi 0% mulai 1 Juli 2008 dan ditinjau dalam waktu 5 tahun.

Adapun pokok-pokok ketentuan yang ada dalam skema IJEPA adalah :

1. Bahwa dalam rangka mendukung kerjasama ekonomi antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang, perlu ditetapkan modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi sebagai pedoman untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari negara Jepang;
2. Modalitas penurunan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi, dengan

menetapkan Kategori Barang (A, B3, B5, B7, B10, B15, X, dan P) serta Jadwal penurunan tarif bea masuk atas masing-masing kategori barang tersebut.

3. Catatan-catatan (*Notes*) Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Kategori Barang adalah sebagai berikut :

- 1). Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
 - (a). Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
 - (b). Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari.
 - (c). Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010
- 2). Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)*
- 3). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 15% pada tanggal implementasi.
 - (b). 12% pada tanggal 1 Januari 2016.
- 4). Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
 - (a). Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
 - (b). Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari.
 - (c). Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009
- 5). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 20% pada tanggal implementasi.
 - (b). 16% pada tanggal 1 Januari 2016
- 6). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 10% pada tanggal implementasi.
 - (b). 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam skema Kesepakatan Perdagangan Barang sebagai bagian dari Kesepakatan Kerangka Kerja Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (AK-FTA) pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan

tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.

- 7). Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
 - (a). Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
 - (b). Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari.
 - (c). Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010
- 8). Tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 10% pada tanggal implementasi.
 - (b). 8% pada tanggal 1 Januari 2009.
 - (c). 6% pada tanggal 1 Januari 2010.
 - (d). 4% pada tanggal 1 Januari 2011.
 - (e). 0% pada tanggal 1 Januari 2012
- 9). Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
 - (a). Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
 - (b). Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari.
 - (c). Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011.
- 10). Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
 - (a). Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
 - (b). Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari.
 - (c). Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009
- 11). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 8% pada tanggal implementasi.
 - (b). 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila terdapat perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.

- 12). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 8% pada tanggal implementasi.
 - (b). 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016
 - 13). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 60% pada tanggal implementasi.
 - (b). 20% pada tanggal 1 Januari 2012.
 - (c). 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
 - 14). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 45% pada tanggal implementasi.
 - (b). 20% pada tanggal 1 Januari 2012.
 - (c). 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih Rendah
 - 15). Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
 - (a). 40% pada tanggal implementasi.
 - (b). 20% pada tanggal 1 Januari 2012.
 - (c). 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah
4. Pemberlakuan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
- (a). Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2008, berlaku dari tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
 - (b). Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2009, berlaku dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
 - (c). Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2010, berlaku dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
 - (d). Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2011, berlaku dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

- (e). Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2012, berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam skema IJEPA adalah sebagai berikut :

1. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
2. Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperlukan dalam hal tarif bea masuk dalam persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum;
3. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada Pemberitahuan Pabean Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada Pemberitahuan Pabean;
4. Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) lembar asli wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor (PPI).

Keuntungan Yang Diharapkan dengan disepakatinya IJEPA

Keuntungan IJEPA bagi Indonesia, diharapkan Jepang akan membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia, *capacity building* untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta investasi industri pendukung. Dan tentunya dalam dagang keuntungan harus seimbang dengan mitranya, Jepang sendiri akan mendapat untung karena Indonesia membuka akses pasar produk-produk Jepang, karena adanya penghapusan tarif. Kesepakatan ini setara atau lebih baik dari AFTA, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan *competitiveness* dan mengamankan posisi di pasar ASEAN.

Selain itu, dengan adanya kesepakatan IJEPA diharapkan dapat menarik investasi langsung dari Jepang, khususnya untuk memperkuat struktur industri nasional dengan

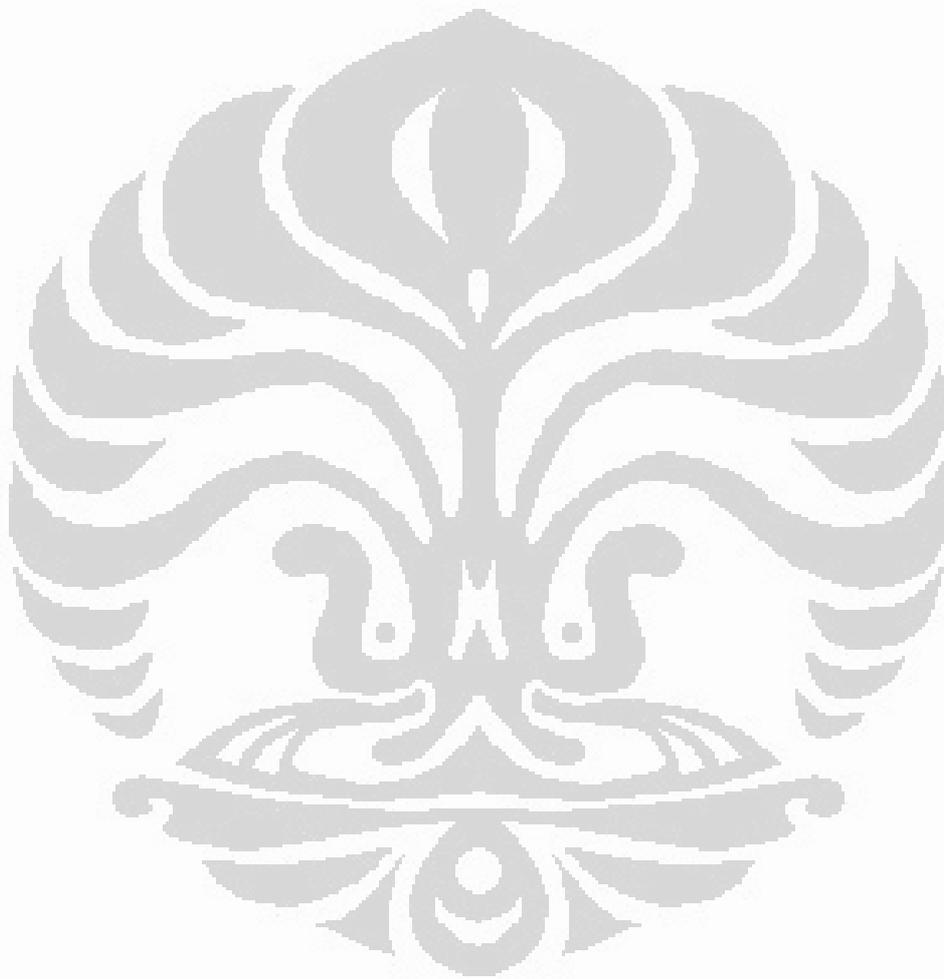
membangun jaringan regional di bidang manufaktur serta peningkatan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk sektor perdagangan barang dan jasa dengan adanya pembukaan akses pasar yang lebih luas dengan penurunan tarif bea masuk atas impor barang, maka peluang peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia akan lebih besar jika dibandingkan dengan aktivitas sebaliknya. Kondisi demikian terjadi karena perdagangan Indonesia dan Jepang di luar sektor migas selama ini selalu menunjukkan surplus bagi Jepang. Dengan demikian, Indonesia harus memanfaatkan akses pasar untuk produk-produknya, sehingga diperoleh manfaat yang optimal dari kesepakatan IJEPA tersebut.

IJEPA merupakan FTA plus yang melibatkan hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia, yaitu dua negara yang memiliki kekuatan ekonomi tidak berimbang, antara negara maju dan negara berkembang. Kedua belah pihak berusaha untuk memperoleh keseimbangan dari ketiga pilar yang mendasari kerja sama bilateral yaitu *liberalization, facilitation, dan cooperation*.

Untuk itu, agar Indonesia memiliki manfaat atas kesepakatan IJEPA, pada saat perundingan dengan Jepang telah diterapkan strategi diantaranya menuju sasaran sebagai berikut :

- i). Drivers Activities (automotive, electronics, dan construction machinery) yang didasarkan atas common interest kedua pihak sebagai penggerak utama hubungan ekonomi dan kerja sama industri, ketiga drivers activities tersebut yang diwaspadai Jepang dengan semakin meningkatnya persaingan terutama dengan Korea dan China. Di sisi lain Indonesia juga berkepentingan dengan produk tersebut yang dapat menjadi penggerak peningkatan ekspor non migas.
- ii). Prosperity Program untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembukaan akses pasar lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia di pasar Jepang agar terjadi peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain dengan dukungan peningkatan investasi-investasi baru dari Jepang yang diikuti dengan peningkatan capacity building.

- iii). Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) industri di Indonesia melalui capacity building sebagai kompensasi pembukaan akses pasar di Indonesia.



BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS

5.1. Analisa Data Nilai Ekspor dan Impor

5.1.1. Ekspor Indonesia ke Jepang

Nilai ekspor Indonesia ke Jepang dianalisa hanya terhadap barang-barang yang termasuk kategori A, yaitu implementasi skema preferensi tarif IJEPA adalah Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi. Kelompok barang ekspor Indonesia ke Jepang yang masuk dalam daftar kategori A adalah sebagai berikut :

- a. Produk Agri industri;
- b. Produk Kehutanan dan hasil hutan;
- c. Produk Perikanan;
- d. Produk Bahan makanan dan minuman;
- e. Produk Tembakau dan hasil tembakau;
- f. Produk Tekstil;
- g. Produk Alas kaki, tutup kepala;
- h. Produk Kayu, Pulp dan kertas;
- i. Produk Kimia;
- j. Produk Furniture.

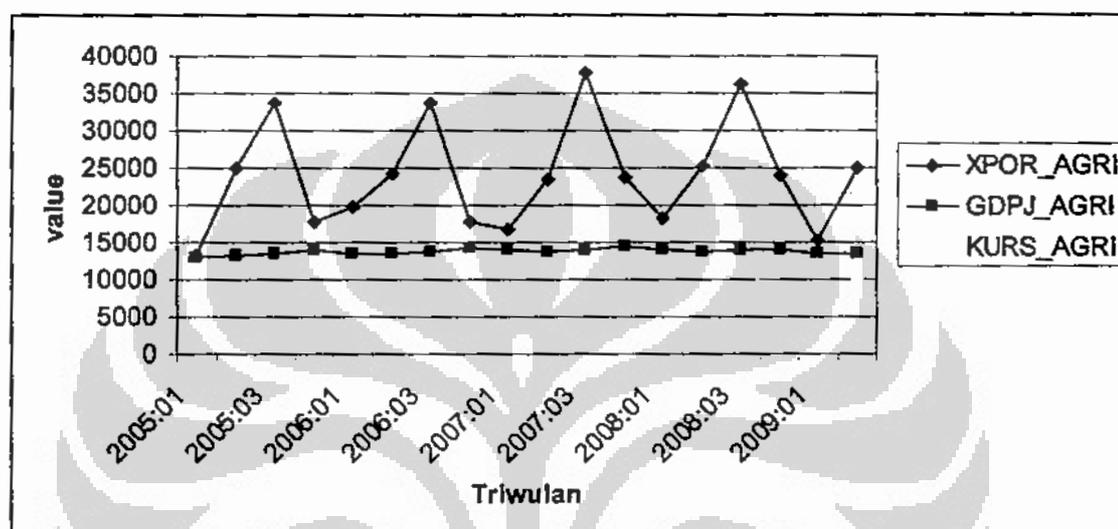
Data aktual nilai ekspor Indonesia ke Jepang terperinci untuk masing-masing Kelompok barang ekspor Indonesia ke Jepang yang masuk dalam daftar kategori A sebagaimana tersebut diatas.

Sehubungan nilai ekspor Indonesia ke Jepang dapat dijelaskan oleh beberapa variabel yang mempengaruhinya, maka kecenderungan (*trend*) nilai ekspor Indonesia ke Jepang akan dilihat juga bersamaan dengan kecenderungan dari variabel penduga atau variabel bebas yang dapat menjelaskan nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Untuk itu

berikut ini disampaikan grafik nilai ekspor Indonesia ke Jepang beserta *trend* dari variabel bebas/penduganya.

a). Produk Agri industri

Gambar 5.1. Nilai Ekspor Produk Agri Industri Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



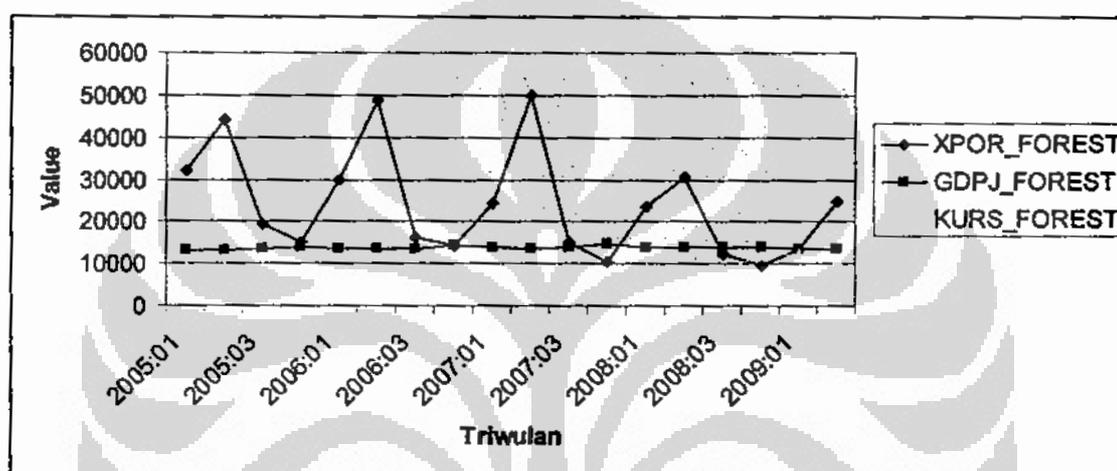
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai kecenderungan (*trend*) berfluktuasi (naik-turun). Pada triwulan III 2005, triwulan III 2006, triwulan III 2007 dan triwulan III 2008 nilai ekspor untuk produk agri industri mencapai titik tertinggi untuk masing-masing tahun, dan titik yang tertinggi sejak triwulan I 2005 sampai dengan triwulan II 2009 adalah pada triwulan III 2007. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk agri industri adalah pada triwulan I 2005 dan triwulan I 2009.

Demikian pula halnya pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), pada saat awal nilai ekspor produk agri industri mencapai titik yang tertinggi, namun sejak triwulan IV 2008 mempunyai kecenderungan turun sampai titik balik minimum pada triwulan I 2009, naik lagi pada triwulan II 2009 walaupun nilainya belum sama seperti pada triwulan III 2008.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk agri industri beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya, maka terdapat kecenderungan apabila nilai ekspor produk agri industri naik, maka kecenderungan dari variabel penduga atau variabel bebas terutama Nilai Tukar turun (atau dibaca dengan kondisi sebaliknya).

b). Produk Kehutanan dan hasil hutan

Gambar 5.2. Nilai Ekspor Produk Kehutanan dan hasil hutan Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



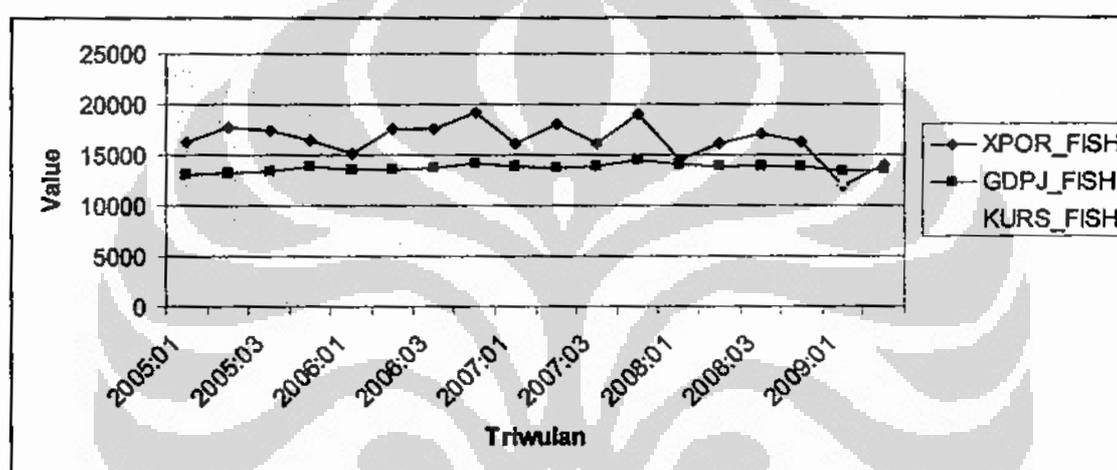
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa sama halnya seperti produk agri industri, nilai ekspor produk kehutanan dan hasil hutan Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai kecenderungan (*trend*) berfluktuasi (naik-turun). Titik tertinggi (titik balik maksimum) untuk masing-masing tahun adalah terjadi pada triwulan II 2005, triwulan II 2006, triwulan II 2007 dan triwulan II 2008 untuk masing-masing tahun, dan titik yang tertinggi sejak triwulan I 2005 sampai dengan triwulan II 2009 adalah pada triwulan II 2007. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk agri industri adalah pada triwulan IV 2008.

Pada saat penerapan IJEP (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mengalami trend menurun hingga mencapai titik yang terendah pada triwulan IV 2008, namun setelah itu mempunyai kecenderungan naik pada triwulan I 2009 dan triwulan II 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk kehutanan dan hasil hutan beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan apabila nilai ekspor produk kehutanan dan hasil hutan naik, maka kecenderungan dari variabel penduga atau variabel bebas terutama Nilai Tukar turun (atau dibaca dengan kondisi sebaliknya).

c). Produk Perikanan

Gambar 5.3. Nilai Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



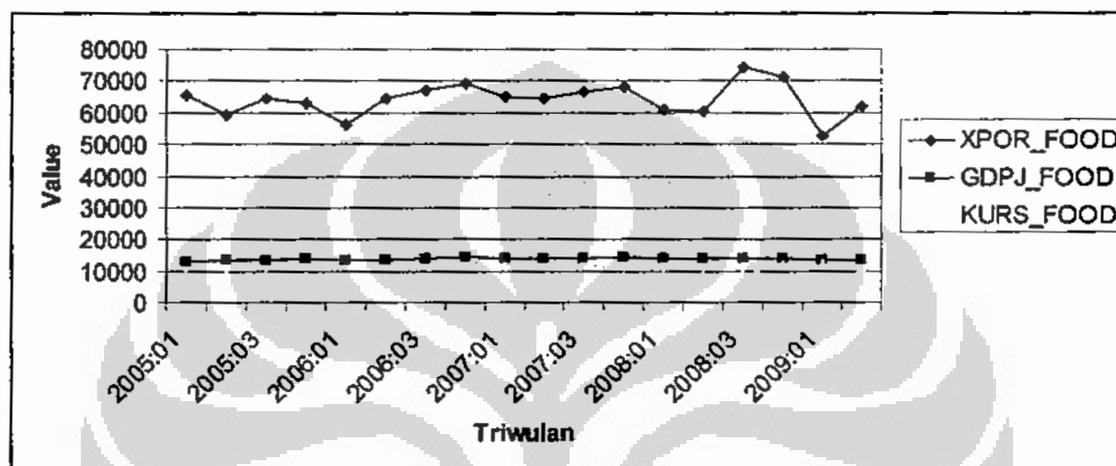
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan IV 2006 dan triwulan IV 2007. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk perikanan adalah pada triwulan I 2009.

Pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mencapai titik balik maksimum sejak titik balik minimum pada triwulan I 2008, namun setelah itu mempunyai kecenderungan turun pada titik terendah di triwulan I 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk perikanan beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan apabila nilai ekspor produk perikanan naik, maka kecenderungan dari variabel penduga atau variabel bebas terutama Nilai Tukar turun (atau dibaca dengan kondisi sebaliknya).

d). Produk Bahan makanan dan minuman

Gambar 5.4. Nilai Ekspor Produk Bahan makanan dan minuman Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



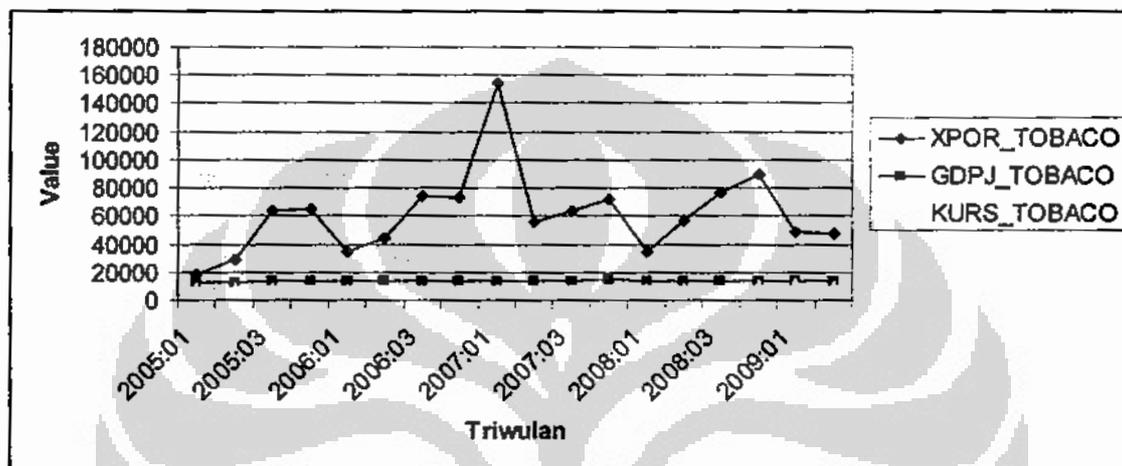
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk bahan makanan dan minuman Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan III 2008, dan mempunyai kecenderungan pada tiap tahunnya titik tertinggi terdapat pada triwulan III atau triwulan IV. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk Bahan makanan dan minuman adalah pada triwulan I 2009.

Pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mencapai titik balik maksimum sejak titik balik minimum pada triwulan II 2008, namun setelah itu mempunyai kecenderungan turun pada titik terendah di triwulan I 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk bahan makanan dan minuman beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan apabila nilai ekspor produk bahan makanan dan minuman naik, maka kecenderungan dari variabel penduga atau variabel bebas terutama Nilai Tukar turun (atau dibaca dengan kondisi sebaliknya).

e). Produk Tembakau dan hasil tembakau

Gambar 5.5. Nilai Ekspor Produk Tembakau dan hasil tembakau Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



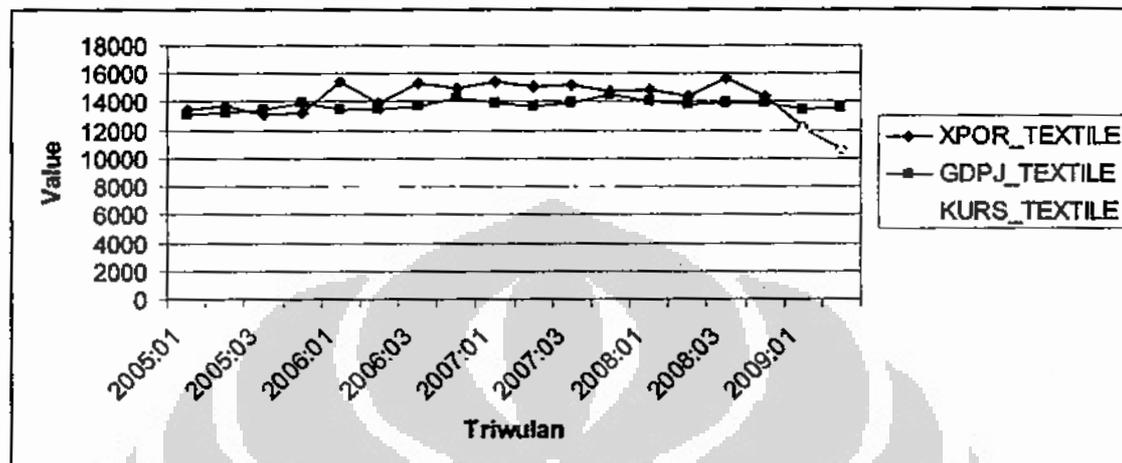
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk Tembakau dan hasil tembakau Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan I 2007. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk Tembakau dan hasil tembakau adalah pada triwulan I 2005, triwulan I 2006 dan triwulan I 2008.

Pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mempunyai kecenderungan menaik sejak titik balik minimum pada triwulan I 2008 sampai dengan titik balik maksimum pada triwulan IV 2008, namun setelah itu mempunyai kecenderungan turun pada triwulan I dan II 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk Tembakau dan hasil tembakau beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang searah.

f). Produk Tekstil

Gambar 5.6. Nilai Ekspor Produk Tekstil Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



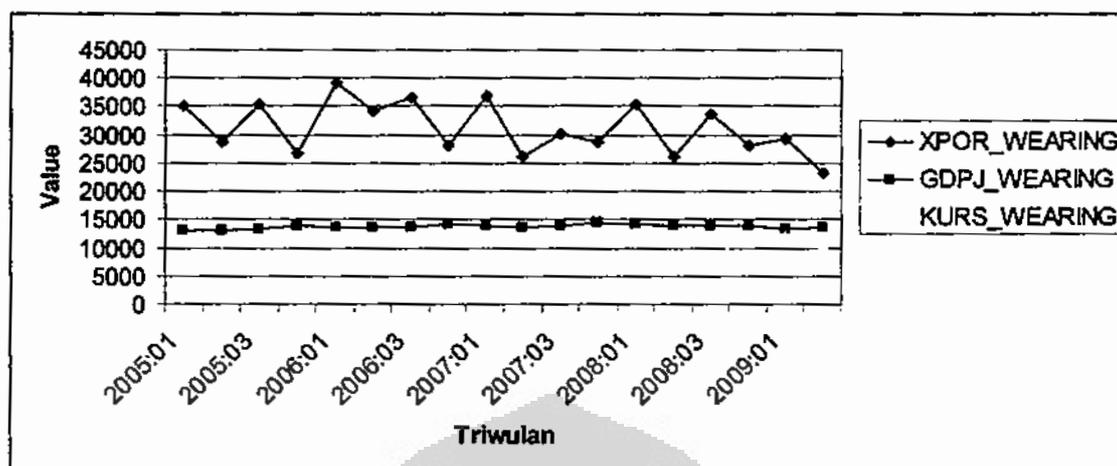
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk Tekstil Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan III 2008. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk Tekstil adalah pada triwulan II 2009.

Pada saat penerapan IJEP (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mencapai titik tertinggi, namun setelah itu mempunyai kecenderungan turun sampai dengan titik terendah pada triwulan II 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk Tekstil beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEP), maka terdapat kecenderungan yang searah.

g). Produk Alas kaki, tutup kepala

Gambar 5.7. Nilai Ekspor Produk Alas kaki, tutup kepala Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



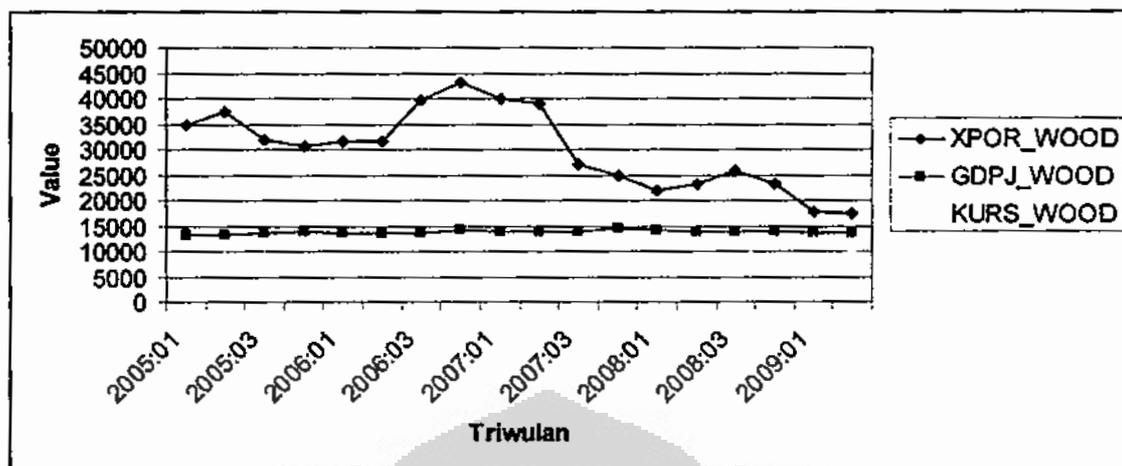
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk Alas kaki, tutup kepala Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan I 2006. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk Alas kaki, tutup kepala adalah pada triwulan II 2009. Pola mempunyai kecenderungan menurun.

Pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mencapai titik balik maksimum, namun setelah itu mempunyai kecenderungan turun sampai dengan titik terendah pada triwulan II 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk Alas kaki, tutup kepala beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang searah.

h). Produk Kayu, Pulp dan kertas

Gambar 5.8. Nilai Ekspor Produk Kayu, Pulp dan kertas Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



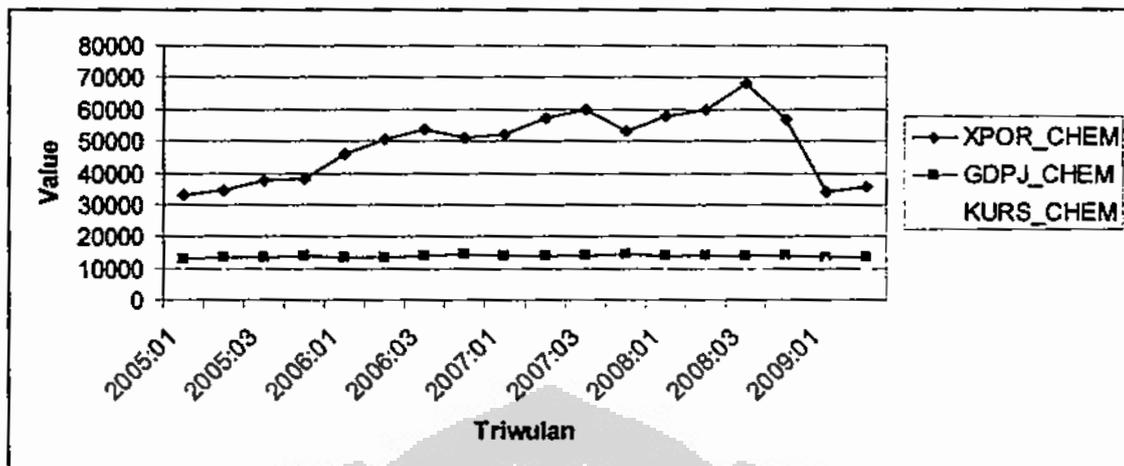
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk Kayu, Pulp dan kertas Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan IV 2006. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk Kayu, Pulp dan kertas adalah pada triwulan II 2009. Pola mempunyai kecenderungan menurun.

Pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mencapai titik balik maksimum, namun setelah itu mempunyai kecenderungan turun sampai dengan titik terendah pada triwulan II 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk Kayu, Pulp dan kertas beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang searah.

i). Produk Kimia

Gambar 5.9. Nilai Ekspor Produk Kimia Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



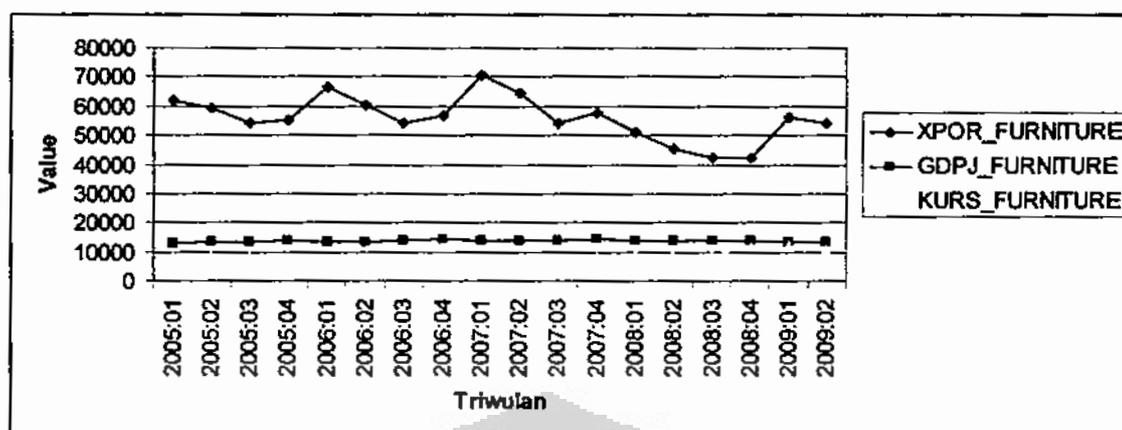
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk Kimia Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan III 2008. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk Kimia adalah pada triwulan I 2009.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, namun pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), nilai ekspor sedang mencapai titik balik maksimum, namun setelah itu mempunyai kecenderungan turun sampai dengan titik terendah pada triwulan I 2009.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk Kimia beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang agak searah.

j). Produk Furniture

Gambar 5.10. Nilai Ekspor Produk Furniture Indonesia ke Jepang beserta GDP Jepang dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor produk Furniture Indonesia ke Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan I 2007. Sedangkan titik terendah nilai ekspor untuk produk Furniture adalah pada triwulan IV 2008.

Pola mempunyai kecenderungan menurun pada saat sebelum penerapan IJEP, namun pada saat penerapan IJEP (pada triwulan III 2008), mempunyai kecenderungan naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai ekspor produk Furniture beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEP), maka terdapat kecenderungan yang agak berlawanan arah.

5.1.2. Impor Indonesia dari Jepang

Nilai impor Indonesia dari Jepang dianalisa hanya terhadap barang-barang yang juga termasuk kategori A, yaitu implementasi skema preferensi tarif IJEP adalah Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi. Kelompok barang impor Indonesia dari Jepang yang masuk dalam daftar kategori A adalah sebagai berikut :

- a. Bahan kimia anorganik;
- b. Bahan kimia organik;
- c. Aneka produk kimia;
- d. Plastik dan barang dari plastik;

- e. Karet dan barang dari karet;
- f. Barang dari batu, mika, semen, asbes atau semacamnya;
- g. Kaca dan barang dari kaca;
- h. Besi dan baja;
- i. Barang dari besi atau baja.

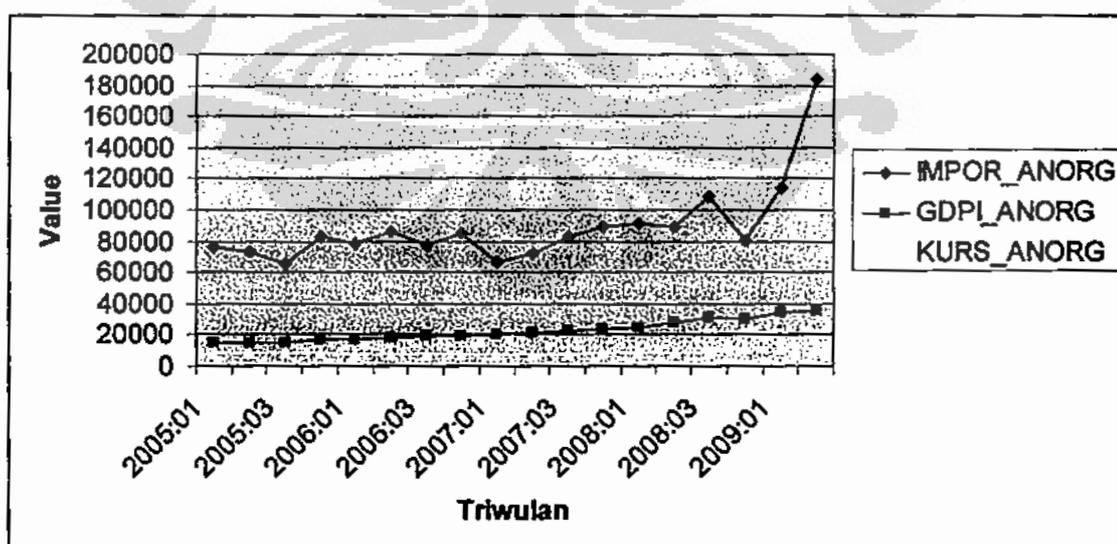
Data aktual nilai impor Indonesia dari Jepang terperinci untuk masing-masing Kelompok barang impor Indonesia dari Jepang yang masuk dalam daftar kategori A sebagaimana tersebut diatas.

Sehubungan nilai impor Indonesia dari Jepang dapat dijelaskan oleh beberapa variabel yang mempengaruhinya, maka kecenderungan (*trend*) nilai impor Indonesia dari Jepang akan dilihat juga bersamaan dengan kecenderungan dari variabel penduga atau variabel bebas yang dapat menjelaskan nilai impor Indonesia dari Jepang.

Untuk itu berikut ini disampaikan grafik nilai impor Indonesia dari Jepang beserta *trend* dari variabel bebas/penduganya.

a). Produk Bahan kimia anorganik

Gambar 5.11. Nilai Impor Produk Bahan kimia anorganik Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



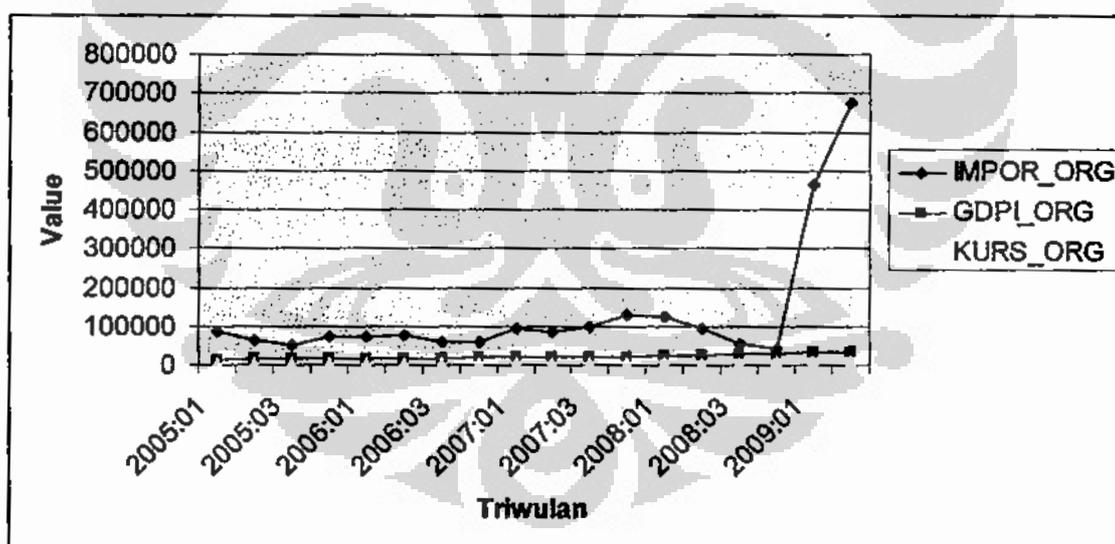
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor bahan kimia anorganik Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan II 2009. Sedangkan titik terendah nilai impor untuk bahan kimia anorganik adalah pada triwulan III 2005.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), juga mempunyai kecenderungan untuk terus naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor bahan kimia anorganik beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya, maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP, namun agak berlawanan arah dengan nilai tukar (terutama saat penerapan IJEPA).

b). Produk Bahan kimia organik

Gambar 5.12. Nilai Impor Produk Bahan kimia organik Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



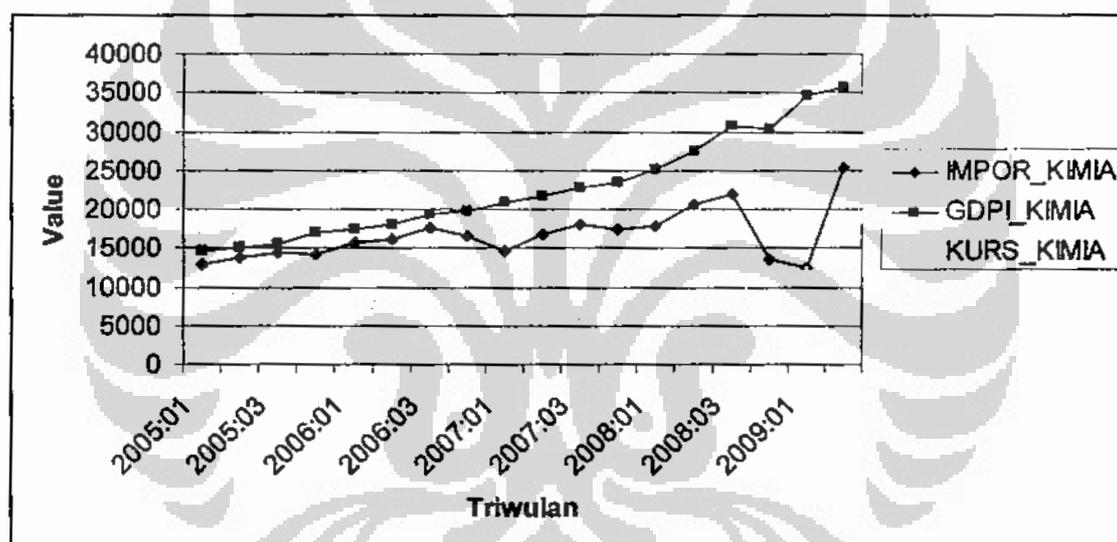
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor bahan kimia organik Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan II 2009. Sedangkan titik terendah nilai impor bahan kimia organik adalah pada triwulan IV 2008.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), juga mempunyai kecenderungan untuk terus naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor bahan kimia organik beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya, maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP, namun agak berlawanan arah dengan nilai tukar (terutama saat penerapan IJEPA).

c). Aneka produk kimia

Gambar 5.13. Nilai Impor Aneka produk kimia Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



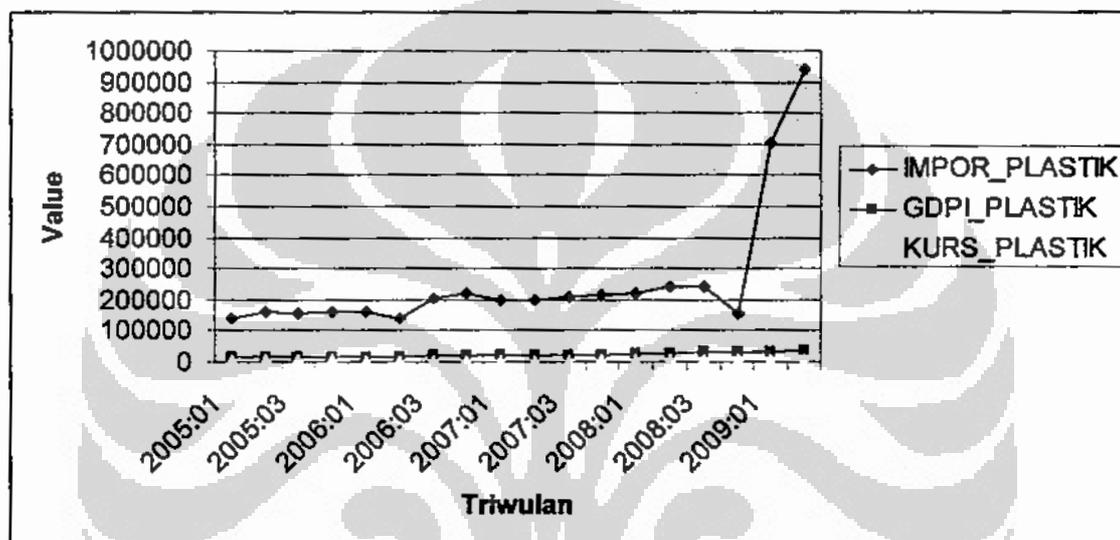
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor Aneka produk kimia Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan II 2009. Sedangkan titik terendah nilai impor Aneka produk kimia adalah pada triwulan I 2009.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), juga mempunyai kecenderungan untuk terus naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor Aneka produk kimia beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya, maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP, namun agak berlawanan arah dengan nilai tukar (terutama saat penerapan IJEPA).

d). Plastik dan barang dari plastik

Gambar 5.14. Nilai Impor produk Plastik dan barang dari plastik Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



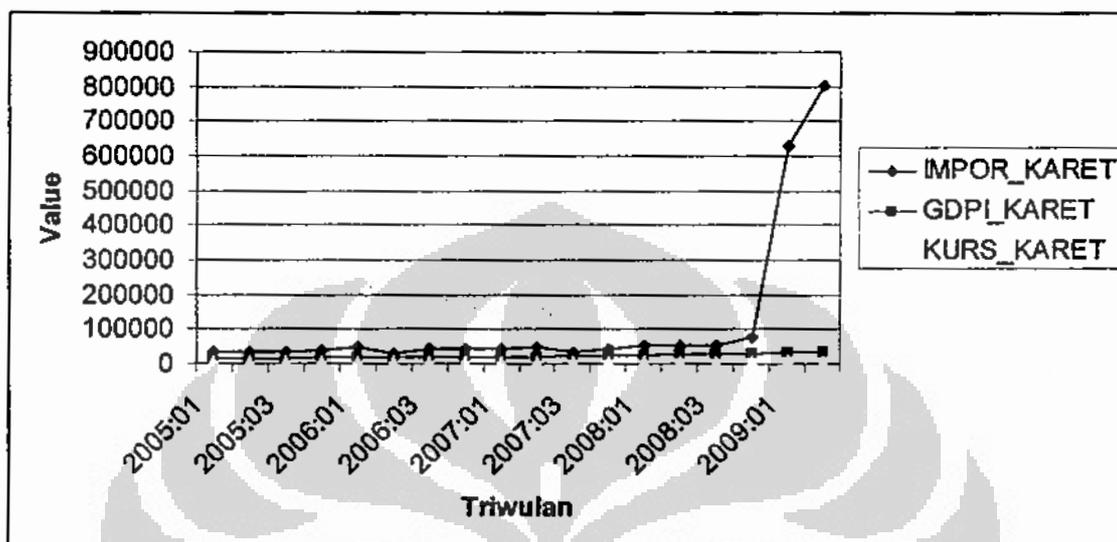
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor produk Plastik dan barang dari plastik Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan II 2009. Sedangkan titik terendah nilai impor produk Plastik dan barang dari plastik adalah pada triwulan I 2005.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), juga mempunyai kecenderungan untuk terus naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor produk Plastik dan barang dari plastik beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya, maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP, namun agak berlawanan arah dengan nilai tukar (terutama saat penerapan IJEPA).

e). Karet dan barang dari karet

Gambar 5.15. Nilai Impor produk Karet dan barang dari karet Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



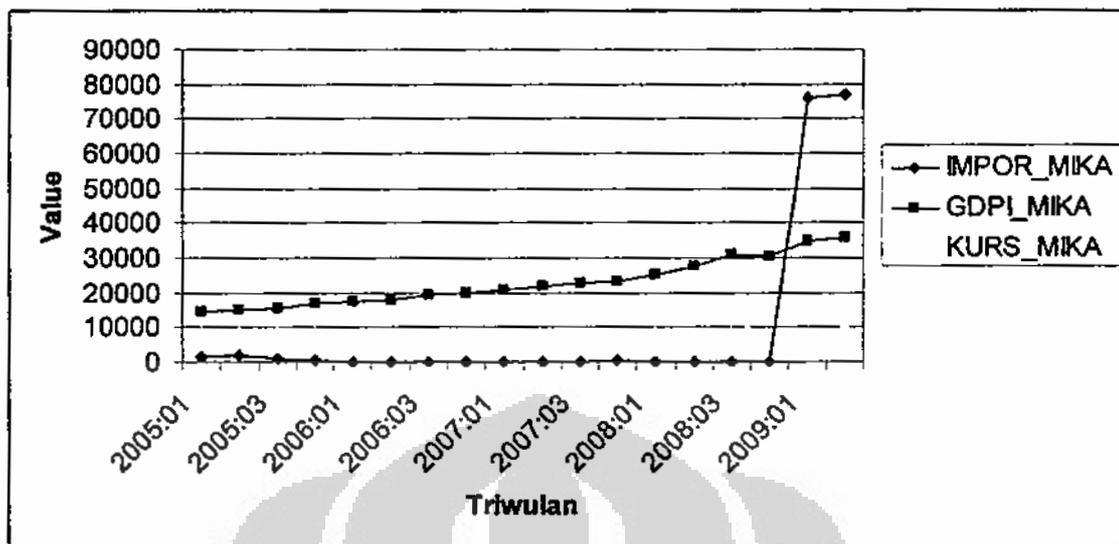
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor produk Karet dan barang dari karet Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan II 2009. Sedangkan titik terendah nilai impor produk Karet dan barang dari karet adalah pada triwulan II 2006.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), juga mempunyai kecenderungan untuk terus naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor produk Karet dan barang dari karet beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya, maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP, namun agak berlawanan arah dengan nilai tukar (terutama saat penerapan IJEPA).

f). Barang dari batu, mika, semen, asbes atau semacamnya

Gambar 5.16. Nilai Impor Barang dari batu, mika, semen, asbes atau semacamnya Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



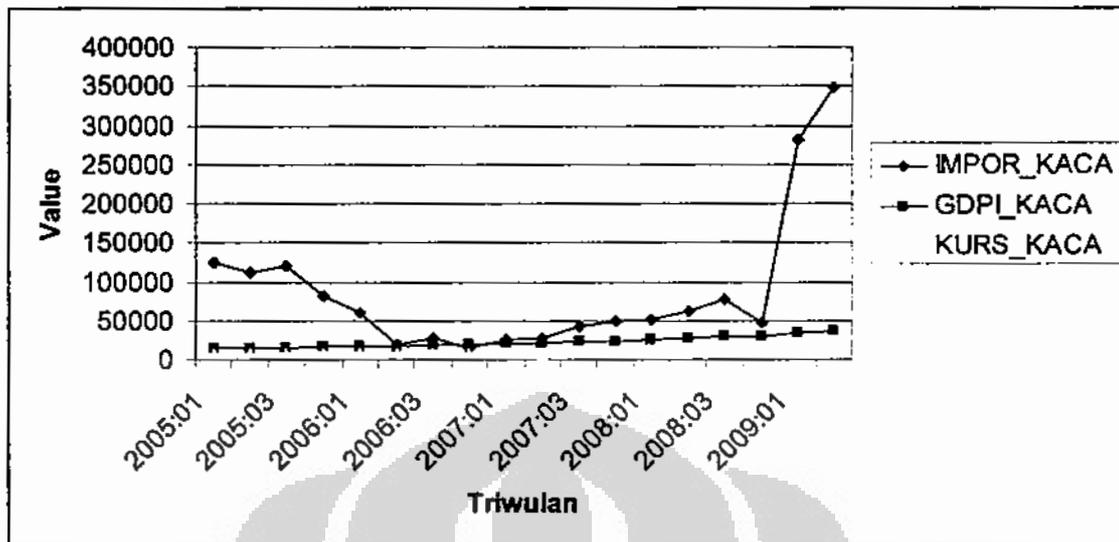
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor Barang dari batu, mika, semen, asbes atau semacamnya Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan II 2009. Sedangkan titik terendah nilai impor Barang dari batu, mika, semen, asbes atau semacamnya adalah pada triwulan II 2008.

Pola mempunyai kecenderungan datar pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), mempunyai kecenderungan untuk terus naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor Barang dari batu, mika, semen, asbes atau semacamnya beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP, namun agak berlawanan arah dengan nilai tukar.

g). Kaca dan barang dari kaca

Gambar 5.17. Nilai Impor Kaca dan barang dari kaca Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



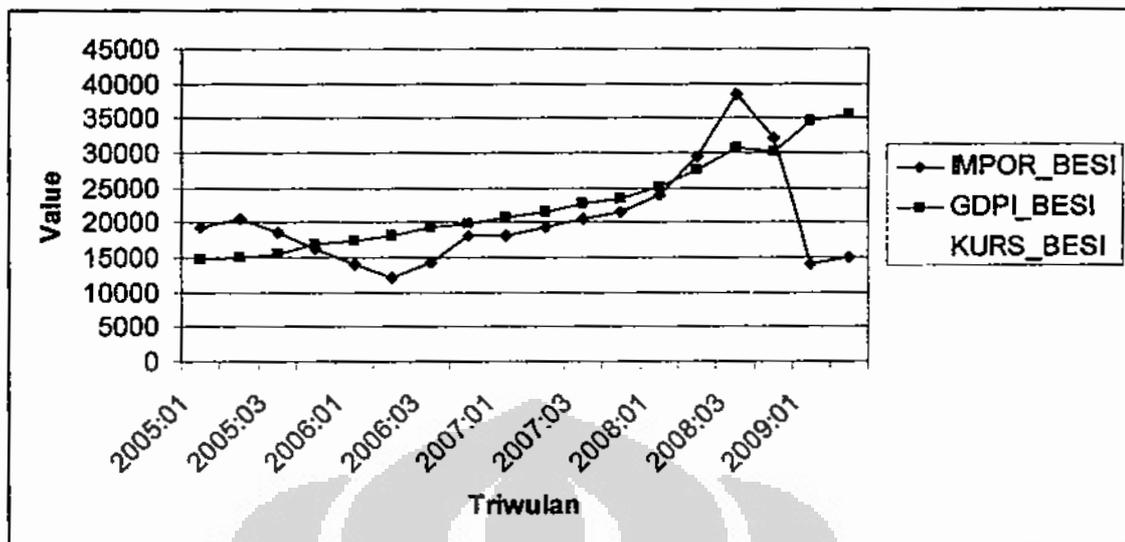
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor Kaca dan barang dari kaca Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan II 2009. Sedangkan titik terendah nilai impor Kaca dan barang dari kaca adalah pada triwulan II 2006.

Pola mempunyai kecenderungan menurun pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), mempunyai kecenderungan untuk terus naik.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor Kaca dan barang dari kaca beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP, namun agak berlawanan arah dengan nilai tukar.

h). Besi dan baja

Gambar 5.18. Nilai Impor Besi dan baja Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



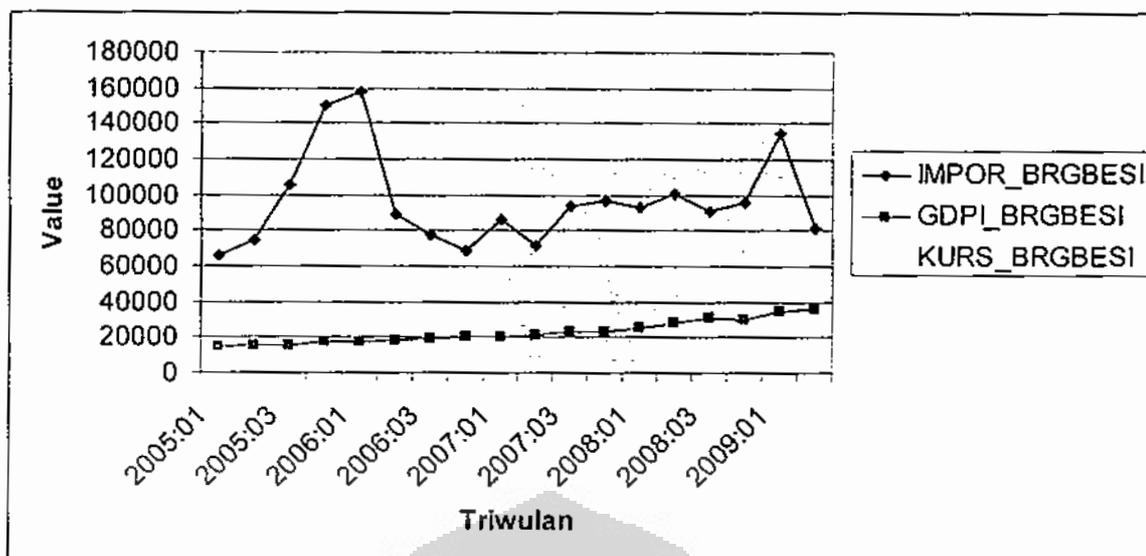
Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor besi dan baja Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan III 2008. Sedangkan titik terendah nilai impor besi dan baja adalah pada triwulan II 2006.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), mempunyai kecenderungan untuk menurun.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor besi dan baja beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP dan nilai tukar.

i). Barang dari besi atau baja

Gambar 5.19. Nilai Impor Barang dari besi atau baja Indonesia dari Jepang beserta GDP Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap JPY



Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa nilai impor barang dari besi atau baja Indonesia dari Jepang sejak triwulan I tahun 2005 sampai dengan triwulan II tahun 2009 mempunyai titik tertinggi pada triwulan I 2006. Sedangkan titik terendah nilai impor barang dari besi atau baja adalah pada triwulan I 2005.

Pola mempunyai kecenderungan menaik pada saat sebelum penerapan IJEPA, dan pada saat penerapan IJEPA (pada triwulan III 2008), mempunyai kecenderungan untuk menurun.

Kemudian jika dilihat kecenderungan nilai impor barang dari besi atau baja beserta kecenderungan variabel yang mempengaruhinya (terutama saat penerapan IJEPA), maka terdapat kecenderungan yang searah dengan GDP dan nilai tukar.

5.2. Hasil Perhitungan Untuk Ekspor (Dari Indonesia ke Jepang)

Dari analisis data nilai ekspor dan impor diketahui bahwa pada triwulan IV 2008, nilai ekspor dan impor (terutama ekspor) mempunyai kecenderungan menurun. Hal ini diduga terjadi akibat imbas krisis keuangan di Amerika Serikat menjalar ke seluruh dunia, yang ditandai dengan kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008. Runtuhnya Lehman Brothers imbasnya menjalar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Jepang mengalami dampak yang cukup parah. Oleh karena hal tersebut diatas variabel KRISIS ditambahkan pada persamaan ekspor dan impor.

Untuk dapat memahami interpretasi atas hasil estimasi model fixed effect dari hasil pengolahan data yang menggunakan evIEWS 4.0, berikut ini adalah hasil estimasi dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang untuk 10 macam jenis produk ekspor, dengan estimasi berupa tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Hasil Output (Ekspor) EvIEWS 4.0

Dependent Variable: LOG(XPOR?)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 01/12/10 Time: 09:18
Sample: 2005:1 2009:2
Included observations: 18
Number of cross-sections used: 10
Total panel (balanced) observations: 180
Convergence achieved after 7 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(GDPJ?)	-1.207714	0.479919	-2.516496	0.0128
LOG(KURS?)	-0.506479	0.199206	-2.542485	0.0119
IJEPA?	-0.109582	0.051943	-2.109640	0.0364
KRISIS?	-0.234511	0.082608	-2.838829	0.0051
Fixed Effects				
_AGRI—C	30.91907			
_FOREST—C	30.84421			
_FISH—C	35.18865			
_FOOD—C	34.24787			
_TOBACO—C	29.49920			
_TEXTILE—C	35.04228			
_WEARING—C	33.51943			
_WOOD—C	35.76052			
_CHEM—C	36.25355			
FURNITURE—C	34.10485			
Weighted Statistics				
R-squared	0.999634	Mean dependent var	24.15273	
Adjusted R-squared	0.999605	S.D. dependent var	13.94520	
S.E. of regression	0.277082	Sum squared resid	12.74459	
Log likelihood	38.55582	F-statistic	34864.39	
Durbin-Watson stat	1.503847	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.985753	Mean dependent var	14.58864	
Adjusted R-squared	0.984638	S.D. dependent var	2.235540	
S.E. of regression	0.277083	Sum squared resid	12.74461	
Durbin-Watson stat	1.447642			

Dari hasil estimasi dapat diperhatikan pertama, *intercept* utk produk ekspor Indonesia ke Jepang adalah :

a. Produk Agri industri	: 30.92
b. Produk Kehutanan dan hasil hutan	: 30.84
c. Produk Perikanan	: 35.19
d. Produk Bahan makanan dan minuman	: 34.25
e. Produk Tembakau dan hasil tembakau	: 29.50
f. Produk Tekstil	: 35.04
g. Produk Alas kaki, tutup kepala	: 33.52
h. Produk Kayu, Pulp dan kertas	: 35.76
i. Produk Kimia	: 36.25
j. Produk Furniture	: 34.10

Kemudian memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi nilai ekspor Indonesia ke Jepang tersebut tidak sesuai dengan tanda yg diharapkan. GDP Jepang bertanda (-). Nilai tukar rupiah terhadap JPY bertanda (-), dan IJEPA bertanda (-). Namun variabel Krisis sesuai dengan tanda (-).

Pada $R^2 = 0.999$, artinya variasi dari independent (eksogen) mampu dijelaskan oleh variabel dependent (endogen) sebesar 99.9 %, dengan kata lain EXPOR dapat dijelaskan oleh variasi GDPJ, KURS dan IJEPA. Variabel GDP Jepang, nilai tukar rupiah terhadap JPY, IJEPA dan KRISIS signifikan secara berturut-turut pada tingkat kepercayaan 95 %.

Karena variabel tersebut dinyatakan dalam log dimana koefisien slope (b_1, b_2, \dots) merupakan rasio antara perubahan relatif variabel endogen terhadap perubahan absolut variabel eksogen, maka variabel endogen dapat mencerminkan pertumbuhan ekspor.

Pada kasus ini maka secara ekonomi, variabel-variabel pada persamaan ini dapat dijelaskan sbb:

- Koefisien variable GDP Jepang, Nilai tukar Rupiah terhadap JPY dan kesepakatan IJEPA pada persamaan diatas tidak sesuai dengan dugaan dan kerangka teori ekonomi yang dipergunakan.

- Perubahan dari besarnya GDP Jepang memiliki korelasi negatif terhadap nilai ekspor dengan makna peningkatan GDP Jepang akan mendorong penurunan nilai ekspor Indonesia ke Jepang, dan sebaliknya.
- Perubahan Nilai tukar rupiah terhadap JPY memiliki korelasi negatif terhadap nilai ekspor. Disini mengandung makna bahwa setiap kenaikan nilai tukar rupiah terhadap JPY akan mendorong penurunan nilai ekspor Indonesia ke Jepang dan sebaliknya.
- Pemberlakuan IJEPA memiliki korelasi negatif terhadap nilai ekspor. Disini mengandung makna bahwa Pemberlakuan IJEPA akan mendorong penurunan nilai ekspor Indonesia ke Jepang.
- Namun Krisis memiliki korelasi negatif terhadap nilai ekspor. Disini mengandung makna bahwa dengan adanya Krisis sangat berpengaruh untuk mendorong penurunan nilai ekspor Indonesia ke Jepang.

Secara teori bahwa depresiasi/apresiasi nilai tukar akan menyebabkan harga barang-barang domestik relatif lebih mahal/murah dibandingkan barang-barang di luar negeri. Dengan demikian ekspor dapat saja meningkat/menurun. Dalam kasus ini terjadinya depresiasi rupiah terhadap JPY, sehingga harga barang dalam negeri lebih murah justru mengakibatkan menurunnya ekspor dari Indonesia ke Jepang.

Seharusnya memang depresiasi Rupiah menguntungkan kondisi dalam negeri, karena secara teoritis akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Harga-harga produk dalam negeri menjadi relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga-harga produk sejenis yang diimpor dari negara lain. Di pasar negara tujuan ekspor Indonesia (dalam hal ini Jepang), konsumen akan lebih memilih produk dari Indonesia karena harganya lebih murah. Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia meningkat. Namun hal itu tidak terjadi karena negara lain juga mengalami hal yang sama seperti Indonesia dimana mata uangnya juga mengalami depresiasi. Krisis global membuat daya beli masyarakat di setiap negara pada umumnya menurun. Sehingga depresiasi tidak serta merta membuat ekspor Indonesia meningkat, bahkan ekspor justru memiliki kecenderungan menurun.

Walaupun IJEPA diberlakukan pada triwulan II 2008, namun karena pada saat yang hampir bersamaan terjadi krisis global akhir 2008, Jepang mengalami resesi yang

serius, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menggerus daya beli masyarakat Jepang. Hal ini sangat mempengaruhi Indonesia, karena Jepang merupakan pangsa pasar yang besar bagi Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat di Jepang menyebabkan penurunan permintaan impor dari Indonesia, dengan demikian ekspor Indonesia pun menurun.

5.3. Hasil Perhitungan Untuk Impor (Dari Jepang ke Indonesia)

Sama dengan seperti halnya ekspor, maka untuk dapat memahami interpretasi atas hasil estimasi model fixed effect dari hasil pengolahan data yang menggunakan evIEWS 4.0, berikut ini adalah hasil estimasi dari nilai impor Indonesia dari Jepang untuk 9 macam jenis produk impor, dengan estimasi berupa tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2
Hasil Output (Impor) EvIEWS 4.0

Dependent Variable: LOG(IMPOR?)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 01/12/10 Time: 09:32
Sample: 2005:1 2009:2
Included observations: 18
Number of cross-sections used: 9
Total panel (unbalanced) observations: 158
Convergence achieved after 14 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(GDPI?)	0.473517	0.140725	3.364844	0.0010
LOG(KURS?)	-0.024536	0.391038	-0.062745	0.9501
IJEPA?	0.069263	0.122487	0.565472	0.5726
KRISIS?	-0.036796	0.167865	-0.219202	0.8268
Fixed Effects				
_ANORG--C	8.055200			
_ORG--C	8.146361			
_KIMIA--C	8.694216			
_PLASTIK--C	8.985052			
_KARET--C	7.674661			
_MIKA--C	2.785117			
_KACA--C	5.398137			
_BESI--C	11.16601			
BRGBESI--C	10.43556			
Weighted Statistics				
R-squared	0.998836	Mean dependent var	38.83002	
Adjusted R-squared	0.998740	S.D. dependent var	26.17946	

S.E. of regression	0.929366	Sum squared resid	125.2395
Log likelihood	-92.41458	F-statistic	10369.57
Durbin-Watson stat	0.958383	Prob(F-statistic)	0.000000
Unweighted Statistics			
R-squared	0.868298	Mean dependent var	13.66689
Adjusted R-squared	0.857398	S.D. dependent var	2.461073
S.E. of regression	0.929366	Sum squared resid	125.2396
Durbin-Watson stat	0.826796		

Dari hasil estimasi dapat diperhatikan pertama, *intercept* utk produk impor Indonesia dari Jepang adalah :

- a. Bahan kimia anorganik : 8.05
- b. Bahan kimia organik : 8.15
- c. Aneka produk kimia : 8.69
- d. Plastik dan barang dari plastik : 8.98
- e. Karet dan barang dari karet : 7.67
- f. Barang dari batu, mika, semen, asbes : 2.78
- g. Kaca dan barang dari kaca : 5.39
- h. Besi dan baja : 11.16
- i. Barang dari besi atau baja : 10.43

Kemudian memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi nilai ekspor Indonesia ke Jepang tersebut telah sesuai dengan tanda yg diharapkan, GDP Indonesia bertanda (+), Nilai tukar rupiah terhadap JPY bertanda (-), IJEPA bertanda (+), dan Krisis bertanda (-)

Pada $R^2 = 0.998$, artinya variasi dari independent (eksogen) mampu dijelaskan oleh variabel dependent (endogen) sebesar 99.8 %, dengan kata lain IMPOR dapat dijelaskan oleh variasi GDPI, KURS dan IJEPA. Variabel GDP Indonesia signifikan pada tingkat kepercayaan 99 %. Sedangkan variabel-variabel nilai tukar rupiah terhadap JPY, IJEPA dan Krisis tidak signifikan.

Karena variabel tersebut dinyatakan dalam log dimana koefisien slope (b_1, b_2, \dots) merupakan rasio antara perubahan relatif variabel endogen terhadap perubahan absolut variabel eksogen, maka variabel endogen dapat mencerminkan pertumbuhan nilai impor.

Pada kasus ini maka secara ekonomi, variabel-variabel pada persamaan ini dapat dijelaskan sbb:

- Koefisien variable GDP Indonesia, Nilai tukar Rupiah terhadap JPY dan kesepakatan IJEPA pada persamaan diatas telah sesuai dengan dugaan dan kerangka teori ekonomi yang dipergunakan.
- Perubahan dari besarnya GDP Indonesia memiliki korelasi positif terhadap nilai impor dengan makna peningkatan GDP Jepang akan mendorong peningkatan nilai impor Indonesia dari Jepang, dan sebaliknya.

Variabel nilai tukar rupiah terhadap JPY, IJEPA dan Krisis tidak berpengaruh terhadap nilai impor Indonesia dari Jepang, hal ini dapat disebabkan beberapa komoditas tersebut bukan merupakan komoditas yang secara langsung dikonsumsi namun merupakan intermediate goods yang merupakan input produksi menjadi komoditas jadi atau komoditas olahan lanjutan.

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan bahwa yang memberikan dampak terbesar terhadap impor Indonesia dari Jepang adalah produk besi dan baja, dan dampak paling kecil adalah barang dari batu, mika, semen, asbes atau semacamnya.

Dampak paling tinggi terhadap besi dan baja dimungkinkan karena komoditi tersebut merupakan bahan baku dalam industri pengolahan logam dan otomotif yang investasinya banyak dilakukan oleh Jepang di Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 Kesimpulan Ekspor Indonesia ke Jepang

Nilai ekspor dari Indonesia ke Jepang secara agregat dapat ditentukan dari hasil regresi persamaan ekspor terlihat bahwa variabel bebas telah mampu mempengaruhi variabel terikat, dengan Koefisien korelasi kuadrat (R^2) = 0.999 artinya perubahan nilai ekspor Indonesia ke Jepang dapat dijelaskan oleh gabungan variabel bebas sebesar 99.9 %.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi nilai ekspor Indonesia ke Jepang tersebut tidak sesuai dengan tanda yg diharapkan, GDP Jepang bertanda (-), Nilai tukar rupiah terhadap JPY bertanda (-), dan kesepakatan IJEPA bertanda (-). Namun variabel Krisis memiliki korelasi negatif terhadap nilai ekspor. Dengan demikian, adanya Krisis sangat berpengaruh untuk mendorong penurunan nilai ekspor Indonesia ke Jepang.

Depresiasi Rupiah seharusnya menguntungkan kondisi dalam negeri. karena secara teoritis akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Namun hal itu tidak terjadi karena negara lain juga mengalami hal yang sama seperti Indonesia dimana mata uangnya juga mengalami depresiasi. Krisis global membuat daya beli masyarakat di setiap negara pada umumnya menurun. Sehingga depresiasi tidak serta merta membuat ekspor Indonesia meningkat, bahkan ekspor justru memiliki kecenderungan menurun.

Walaupun IJEPA diberlakukan pada triwulan II 2008, namun karena pada saat yang hampir bersamaan terjadi krisis global akhir 2008, maka hal ini sangat mempengaruhi Indonesia, karena Jepang merupakan pangsa pasar yang besar bagi Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat di Jepang menyebabkan penurunan permintaan impor dari Indonesia, dengan demikian ekspor Indonesia pun menurun.

6.2 Kesimpulan Impor Indonesia dari Jepang

Nilai impor Indonesia dari Jepang secara agregat dapat ditentukan dari hasil regresi persamaan impor terlihat bahwa variabel bebas telah mampu mempengaruhi

variabel terikat, dengan Koefisien korelasi kuadrat (R^2) = 0.998 artinya perubahan nilai impor Indonesia dari Jepang dapat dijelaskan oleh gabungan variabel bebasnya sebesar 99.8 %.

Dari hasil penelitian menunjukkan variabel GDP Indonesia signifikan pada tingkat kepercayaan 99 %. Sedangkan variabel-variabel nilai tukar rupiah terhadap JPY, IJEPA dan Krisis tidak signifikan.

Variabel nilai tukar rupiah terhadap JPY dan IJEPA tidak berpengaruh terhadap nilai impor Indonesia dari Jepang. hal ini dapat disebabkan beberapa komoditas tersebut bukan merupakan komoditas yang secara langsung dikonsumsi namun merupakan *intermediate goods* yang merupakan input produksi menjadi komoditas jadi atau komoditas olahan lanjutan.

Perubahan dari besarnya GDP Indonesia memiliki korelasi positif terhadap nilai impor dengan makna peningkatan GDP Jepang akan mendorong peningkatan nilai impor Indonesia dari Jepang.

Dampak paling tinggi adalah impor terhadap besi dan baja, hal ini dimungkinkan karena komoditi tersebut merupakan bahan baku dalam industri pengolahan logam dan otomotif yang investasinya banyak dilakukan oleh Jepang di Indonesia.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ternyata setelah penerapan IJEPA, bahwa korelasi positif pada variabel kesepakatan IJEPA terdapat pada persamaan impor. Untuk itu agar Indonesia dapat lebih memanfaatkan kesepakatan IJEPA ini, diberikan beberapa saran untuk meningkatkan manfaat lebih bagi Indonesia dalam perdagangan selanjutnya, yaitu :

1. Sesuai hasil penelitian diatas bahwa nilai ekspor Indonesia ke Jepang cenderung menurun, selain disebabkan oleh imbas krisis global di Jepang, dapat juga disebabkan oleh pesaing produk Indonesia seperti halnya dari China dan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian disarankan agar Indonesia terus mengembangkan komoditi-komoditi yang memiliki daya saing yang tangguh, dan melakukan spesialisasi pada komoditi tersebut.

2. Untuk meningkatkan nilai ekspor dari Indonesia ke Jepang diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta pengembangan infrastruktur secara komprehensif.
3. Peluang ekspor Indonesia ke Jepang sangat tergantung pada pola perdagangan Indonesia dan Jepang. Di pasar negara ini, produk Indonesia harus bersaing dengan produk negara-negara lain. Untuk itu agar nilai ekspor Indonesia ke Jepang dapat semakin meningkat, diperlukan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Jepang, salah satu diantaranya dengan memanfaatkan kesepakatan IJEPA yang pada tahun I (Juli 2008 sampai dengan Juni 2009) belum memberikan manfaat terhadap peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang.
4. Selain hal tersebut diatas, model penelitian yang dilakukan terbatas hanya pada model permintaan ekspor – impor dengan menggunakan variabel GDP, Nilai tukar dan pemberlakuan IJEPA, sehingga hasil estimasi untuk ekspor meunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan, depresiasi rupiah dan peningkatan GDP Jepang justru menyebabkan menurunnya nilai ekspor Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan hipotesa penelitian ini yang dilakukan dengan keterbatasan, belum meninjau dari variabel-variabel lainnya seperti pola perdagangan Jepang dengan negara-negara kompetitor produk Indonesia, dan faktor perbandingan daya saing komoditi Indonesia dengan negara-negara lain di pasar dunia (khususnya Jepang)>

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Lia, *Ekonomi Internasional*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Appleyard, Denis R. dan Field Alfred J., *International Economics*, Richard D. Irwin Inc., Chicago, 1995.
- Dunn, Robert M. & Ingram, James C., *International Economics*, John Wiley & Sons, New York, 1996.
- Feridhanusetyawan, Tubagus dan Pangestu, Mari, *Indonesian Trade Liberalization : Estimating the Gains*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Center Strategic and International Studies, Jakarta, 2003
- Gujarati, Damodar N., *Basic Econometrics*, fourth edition, McGraw Hill, 2003.
- Hady, Hamdy, *Ekonomi Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Halwani, Hendra, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, 2005.
- Halwani, Hendra, *Perdagangan Internasional dan Liberalisasi Ekonomi*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1999.
- Husted, Steven & Michael Melvin, *International Economics*, Harper and Row Publisher, New York, 1990.
- Kindleberger, Charles P. dan Lindert H., *Ekonomi Internasional*, Cetakan Ketiga, Gelora Aksara Pratama, 1993.
- Krugman, Paul R and Maurice Obstfeld, *International Economics*, Fifth Edition, Pearson Education International, 2000.
- Mankiw Gregory N, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Mankiw Gregory N, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.

- Manurung, Jonni J, Manurung Adler Haymans dan Saragih Ferdinand Dehoutman, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Elex Media Komputindo, 2005.
- Meilani, Erika, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas Indonesia-Jepang Dengan Pendekatan Global Trade Analysis Project (GTAP)*, Universitas Indonesia, 2008
- Manurung, Jonni J, Manurung Adler Haymans dan Saragih Ferdinand Dehoutman, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Elex Media Komputindo, 2005
- Nachrowi Djalal Nachrowi dan Usman Hardius, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Nenci S. dan Pietrobelli, C., *Does Tariff Liberalization Promote Trade?* Working Paper CREI No.4.,University of Rome, Rome.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*. LP FEUI, Jakarta, 2005.
- Salvatore D., *International Economics*, MacMillan Publishing Company. New York. 1993.
- Santos-Paulino, Amelia U, *Trade Liberalization and Economic Performance: Theory and Evidence for Developing Countries*, The Economic Journal, Balckwell Publishing, UK.
- Spanu, Vlad, *Liberalization of International Trade and Economic Growth: Implication for Both Developed And Developing Countries*, Paper, Harvard University,2003.
- Sjamsul Arifin, Dian Ediana RAE dan Charles P.R. Joseph, *Kerja Sama Perdagangan Internasional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Tri Joelyartini, Siti, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas Indonesia-Korea Selatan Dalam Kerangka Liberalisasi Perdagangan ASEAN Korea Free Trade Area (FTA)*, Universitas Indonesia, 2007

Estimation Command:

LOG(XPOR) LOG(GDPJ) LOG(KURS) IJEPa KRISIS

Dependent Variable: LOG(XPOR?)
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 01/12/10 Time: 09:18
 Sample: 2005:1 2009:2
 Included observations: 18
 Number of cross-sections used: 10
 Total panel (balanced) observations: 180
 Convergence achieved after 7 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(GDPJ?)	-1.207714	0.479919	-2.516496	0.0128
LOG(KURS?)	-0.506479	0.199206	-2.542485	0.0119
IJEPa?	-0.109582	0.051943	-2.109640	0.0364
KRISIS?	-0.234511	0.082608	-2.838829	0.0051
Fixed Effects				
_AGRI—C	30.91907			
_FOREST—C	30.84421			
_FISH—C	35.18865			
_FOOD—C	34.24787			
_TOBACO—C	29.49920			
_TEXTILE—C	35.04228			
_WEARING—C	33.51943			
_WOOD—C	35.76052			
_CHEM—C	36.25355			
_FURNITURE—C	34.10485			
Weighted Statistics				
R-squared	0.999634	Mean dependent var	24.15273	
Adjusted R-squared	0.999605	S.D. dependent var	13.94520	
S.E. of regression	0.277082	Sum squared resid	12.74459	
Log likelihood	38.55582	F-statistic	34864.39	
Durbin-Watson stat	1.503847	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.985753	Mean dependent var	14.58864	
Adjusted R-squared	0.984638	S.D. dependent var	2.235540	
S.E. of regression	0.277083	Sum squared resid	12.74461	
Durbin-Watson stat	1.447642			

Lampiran 2
 Persamaan Impor Hasil Output Eviews 4

Estimation Command:

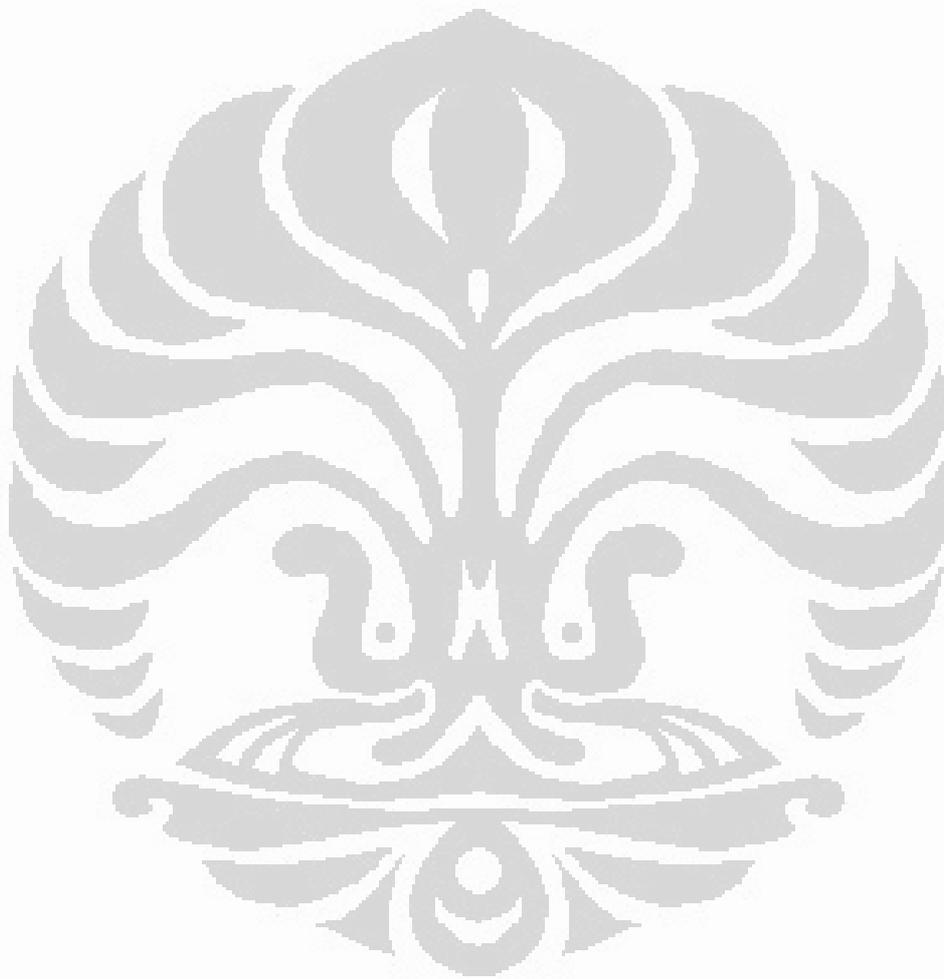
=====

LOG(IMPOR) LOG(GDPI) LOG(KURS) IJEPA KRISIS

Dependent Variable: LOG(IMPOR?)
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 01/12/10 Time: 09:32
 Sample: 2005:1 2009:2
 Included observations: 18
 Number of cross-sections used: 9
 Total panel (unbalanced) observations: 158
 Convergence achieved after 14 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(GDPI?)	0.473517	0.140725	3.364844	0.0010
LOG(KURS?)	-0.024536	0.391038	-0.062745	0.9501
IJEPA?	0.069263	0.122487	0.565472	0.5726
KRISIS?	-0.036796	0.167865	-0.219202	0.8268
Fixed Effects				
_ANORG--C	8.055200			
_ORG--C	8.146361			
_KIMIA--C	8.694216			
_PLASTIK--C	8.985052			
_KARET--C	7.674661			
_MIKA--C	2.785117			
_KACA--C	5.398137			
_BESI--C	11.16601			
BRGBESI--C	10.43556			
Weighted Statistics				
R-squared	0.998836	Mean dependent var	38.83002	
Adjusted R-squared	0.998740	S.D. dependent var	26.17946	
S.E. of regression	0.929366	Sum squared resid	125.2395	
Log likelihood	-92.41458	F-statistic	10369.57	
Durbin-Watson stat	0.958383	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.868298	Mean dependent var	13.66689	
Adjusted R-squared	0.857398	S.D. dependent var	2.461073	
S.E. of regression	0.929366	Sum squared resid	125.2396	
Durbin-Watson stat	0.826796			

Lampiran 3
Data Ekspor Indonesia ke Jepang



	XPOR_AGRI	GDPJ_AGRI	IJEPA_AGRI	KURS_AGRI	XPOR_FOREST	GDPJ_FOREST	IJEPA_FOREST	KURS_FOREST
2005:01	106,034.0	131242.5	0	8842.71	258,494.2	131242.5	0	8842.71
2005:02	201,050.8	131870.0	0	8871.77	355,536.3	131870.0	0	8871.77
2005:03	269,891.8	134265.4	0	8027.63	153,878.1	134265.4	0	8027.63
2005:04	140,513.7	139384.3	0	8486.34	121,250.1	139384.3	0	8486.34
2006:01	160,604.6	135211.7	0	7877.23	242,480.7	135211.7	0	7877.23
2006:02	189,436.4	135041.7	0	7985.98	385,465.6	135041.7	0	7985.98
2006:03	255,208.7	136871.2	0	7840.17	123,456.3	136871.2	0	7840.17
2006:04	132,040.3	142648.1	0	7740.10	106,172.3	142648.1	0	7740.10
2007:01	120,366.2	139293.3	0	7654.39	175,318.4	139293.3	0	7654.39
2007:02	162,214.8	137351.4	0	7404.03	345,312.9	137351.4	0	7404.03
2007:03	262,133.5	139168.3	0	7921.87	104,770.7	139168.3	0	7921.87
2007:04	163,877.5	145543.2	0	8251.74	73,062.0	145543.2	0	8251.74
2008:01	120,759.3	141083.4	0	8867.40	154,502.5	141083.4	0	8867.40
2008:02	159,251.7	138470.1	0	8787.91	194,791.1	138470.1	0	8787.91
2008:03	220,896.3	138796.5	1	8562.50	75,278.0	138796.5	1	8562.50
2008:04	128,432.9	138869.4	1	12019.84	50,543.9	138869.4	1	12019.84
2009:01	76,309.7	134564.5	1	12245.33	68,057.6	134564.5	1	12245.33
2009:02	128,803.6	135775.5	1	10787.67	127,588.6	135775.5	1	10787.67

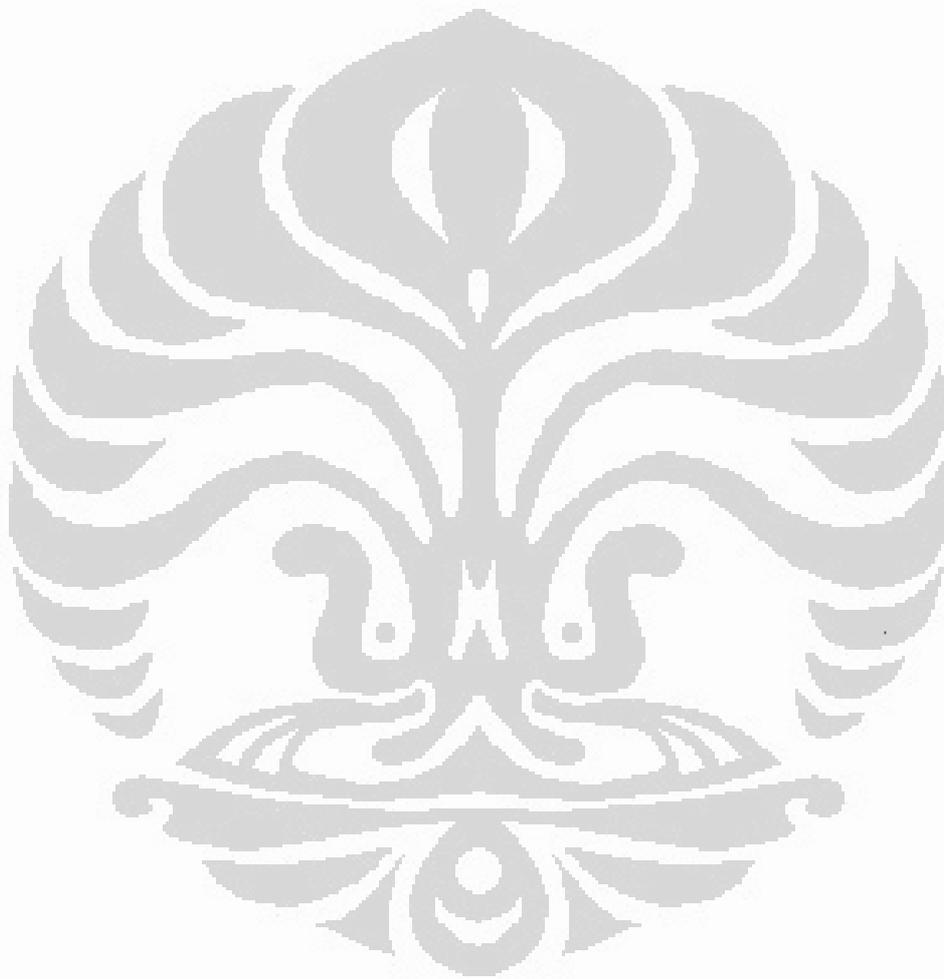
	XPOR_FISH	GDPJ_FISH	IJEPA_FISH	KURS_FISH	XPOR_FOOD	GDPJ_FOOD	IJEPA_FOOD	KURS_FOOD
2005:01	13,108,881.4	131242.5	0	8842.71	5,262,517.0	131242.5	0	8842.71
2005:02	14,322,887.1	131870.0	0	8871.77	4,779,921.0	131870.0	0	8871.77
2005:03	13,676,094.6	134265.4	0	9027.63	5,164,724.1	134265.4	0	9027.63
2005:04	13,082,430.7	139384.3	0	8486.34	5,019,741.9	139384.3	0	8486.34
2006:01	12,238,994.8	135211.7	0	7877.23	4,590,376.8	135211.7	0	7877.23
2006:02	13,818,897.8	135041.7	0	7995.98	5,069,713.1	135041.7	0	7995.98
2006:03	13,342,073.6	136871.2	0	7840.17	5,080,842.6	136871.2	0	7840.17
2006:04	14,156,459.4	142648.1	0	7740.10	5,110,947.0	142648.1	0	7740.10
2007:01	11,655,563.8	139293.3	0	7654.39	4,699,238.2	139293.3	0	7654.39
2007:02	12,474,338.1	137351.4	0	7404.03	4,464,568.5	137351.4	0	7404.03
2007:03	11,172,089.6	139168.3	0	7921.87	4,588,293.5	139168.3	0	7921.87
2007:04	13,086,163.5	145543.2	0	8251.74	4,690,228.2	145543.2	0	8251.74
2008:01	9,598,888.8	141083.4	0	8867.40	4,015,995.1	141083.4	0	8867.40
2008:02	10,184,579.3	138470.1	0	8787.91	3,809,689.7	138470.1	0	8787.91
2008:03	10,345,474.0	138796.5	1	8562.50	4,520,666.0	138796.5	1	8562.50
2008:04	8,708,306.9	138869.4	1	12019.84	3,764,648.1	138869.4	1	12019.84
2009:01	5,982,141.5	134564.5	1	12245.33	2,638,126.1	134564.5	1	12245.33
2009:02	7,281,406.7	135775.5	1	10787.67	3,190,404.9	135775.5	1	10787.67

	XPOR_TOBACO	GDPJ_TOBACO	IJEPA_TOBACO	KURS_TOBACO	XPOR_TEXTILE	GDPJ_TEXTILE	IJEPA_TEXTILE	KURS_TEXTILE
2005:01	14,855.7	131242.5	0	8842.71	10,843,381.3	131242.5	0	8842.71
2005:02	23,180.6	131870.0	0	8871.77	11,012,899.5	131870.0	0	8871.77
2005:03	50,839.4	134265.4	0	9027.63	10,499,638.3	134265.4	0	9027.63
2005:04	51,504.4	139384.3	0	8486.34	10,525,589.6	139384.3	0	8486.34
2006:01	26,326.1	135211.7	0	7877.23	12,480,876.4	135211.7	0	7877.23
2006:02	34,632.7	135041.7	0	7995.98	10,835,268.3	135041.7	0	7995.98
2006:03	56,215.1	136871.2	0	7840.17	11,582,156.0	136871.2	0	7840.17
2006:04	64,570.7	142848.1	0	7740.10	11,123,428.3	142848.1	0	7740.10
2007:01	112,844.8	139283.3	0	7654.39	11,201,831.1	139283.3	0	7654.39
2007:02	39,026.0	137351.4	0	7404.03	10,496,490.5	137351.4	0	7404.03
2007:03	44,380.9	139168.3	0	7921.87	10,553,130.0	139168.3	0	7921.87
2007:04	49,404.5	145543.2	0	8251.74	10,131,589.0	145543.2	0	8251.74
2008:01	23,087.9	141083.4	0	8867.40	9,843,991.5	141083.4	0	8867.40
2008:02	36,151.7	139470.1	0	8787.91	9,073,709.9	139470.1	0	8787.91
2008:03	48,282.6	138786.5	0	8562.50	9,483,627.8	138786.5	0	8562.50
2008:04	48,202.9	138868.4	1	12019.84	7,504,423.9	138868.4	1	12019.84
2009:01	24,514.5	134564.5	1	12245.33	6,114,137.7	134564.5	1	12245.33
2009:02	24,757.4	135775.5	1	10787.67	5,525,915.8	135775.5	1	10787.67

	XPOR_WEARING	GDPJ_WEARING	IJEPA_WEARING	KURS_WEARING	XPOR_WOOD	GDPJ_WOOD	IJEPA_WOOD	KURS_WOOD
2005:01	2,827,218.6	131242.5	0	8842.71	27,961,247.3	131242.5	0	8842.71
2005:02	2,310,592.7	131870.0	0	8871.77	30,273,841.9	131870.0	0	8871.77
2005:03	2,824,914.8	134265.4	0	9027.63	25,455,149.0	134265.4	0	9027.63
2005:04	2,117,905.2	139384.3	0	8486.34	24,233,609.3	139384.3	0	8486.34
2006:01	3,184,252.8	135211.7	0	7877.23	25,578,258.1	135211.7	0	7877.23
2006:02	2,889,541.0	135041.7	0	7995.98	24,733,584.1	135041.7	0	7995.98
2006:03	2,758,205.3	136871.2	0	7840.17	28,920,731.4	136871.2	0	7840.17
2006:04	2,077,042.4	142848.1	0	7740.10	32,011,099.1	142848.1	0	7740.10
2007:01	2,670,795.5	139283.3	0	7654.39	29,040,438.7	139283.3	0	7654.39
2007:02	1,806,230.8	137351.4	0	7404.03	27,088,688.1	137351.4	0	7404.03
2007:03	2,098,399.3	139168.3	0	7921.87	18,797,889.7	139168.3	0	7921.87
2007:04	1,964,824.5	145543.2	0	8251.74	17,025,559.1	145543.2	0	8251.74
2008:01	2,328,667.4	141083.4	0	8867.40	14,516,169.4	141083.4	0	8867.40
2008:02	1,856,937.4	138470.1	0	8787.91	14,752,876.3	138470.1	0	8787.91
2008:03	2,041,271.9	138786.5	1	8562.50	15,583,248.5	138786.5	1	8562.50
2008:04	1,488,422.5	138868.4	1	12019.84	12,258,561.3	138868.4	1	12019.84
2009:01	1,462,632.2	134564.5	1	12245.33	8,928,840.0	134564.5	1	12245.33
2009:02	1,202,690.1	135775.5	1	10787.67	9,003,558.0	135775.5	1	10787.67

	XPOR_CHEM	GDPJ_CHEM	IEPA_CHEM	KURS_CHEM	XPOR_FURNITURE	GDPJ_FURNITURE	IEPA_FURNITURE	KURS_FURNITURE	KURS_FURNITURE
2005:01	26,368,658.5	131242.5	0	8842.71	4,867,772.9	131242.5	0	8842.71	
2005:02	28,044,830.6	131870.0	0	8871.77	4,788,699.2	131870.0	0	8871.77	
2005:03	30,097,188.8	134285.4	0	9027.63	4,305,975.8	134285.4	0	9027.63	
2005:04	30,176,449.8	139384.3	0	8485.34	4,379,338.9	139384.3	0	8485.34	
2006:01	37,211,033.0	135211.7	0	7877.23	5,390,294.0	135211.7	0	7877.23	
2006:02	39,518,286.1	135041.7	0	7995.98	4,765,060.2	135041.7	0	7995.98	
2006:03	40,380,711.9	136871.2	0	7840.17	4,103,983.1	136871.2	0	7840.17	
2006:04	38,011,035.7	142648.1	0	7740.10	4,209,393.7	142648.1	0	7740.10	
2007:01	37,596,933.4	139293.3	0	7654.39	5,119,205.7	139293.3	0	7654.39	
2007:02	39,529,390.7	137351.4	0	7404.03	4,473,812.8	137351.4	0	7404.03	
2007:03	41,382,384.3	139188.3	0	7921.87	3,760,923.3	139188.3	0	7921.87	
2007:04	38,416,221.7	145543.2	0	8251.74	3,986,369.8	145543.2	0	8251.74	
2008:01	38,091,639.0	141083.4	0	8887.40	3,353,240.8	141083.4	0	8887.40	
2008:02	37,876,848.9	136470.1	0	8787.91	2,873,155.1	136470.1	0	8787.91	
2008:03	41,268,551.1	138796.5	1	8562.50	2,573,756.2	138796.5	1	8562.50	
2008:04	30,068,837.6	138869.4	1	12019.84	2,244,054.3	138869.4	1	12019.84	
2008:01	18,944,033.0	134584.5	1	12245.33	2,806,036.9	134584.5	1	12245.33	
2008:02	18,274,729.6	135775.5	1	10787.67	2,799,307.5	135775.5	1	10787.67	

Lampiran 4
Data Impor Indonesia dari Jepang

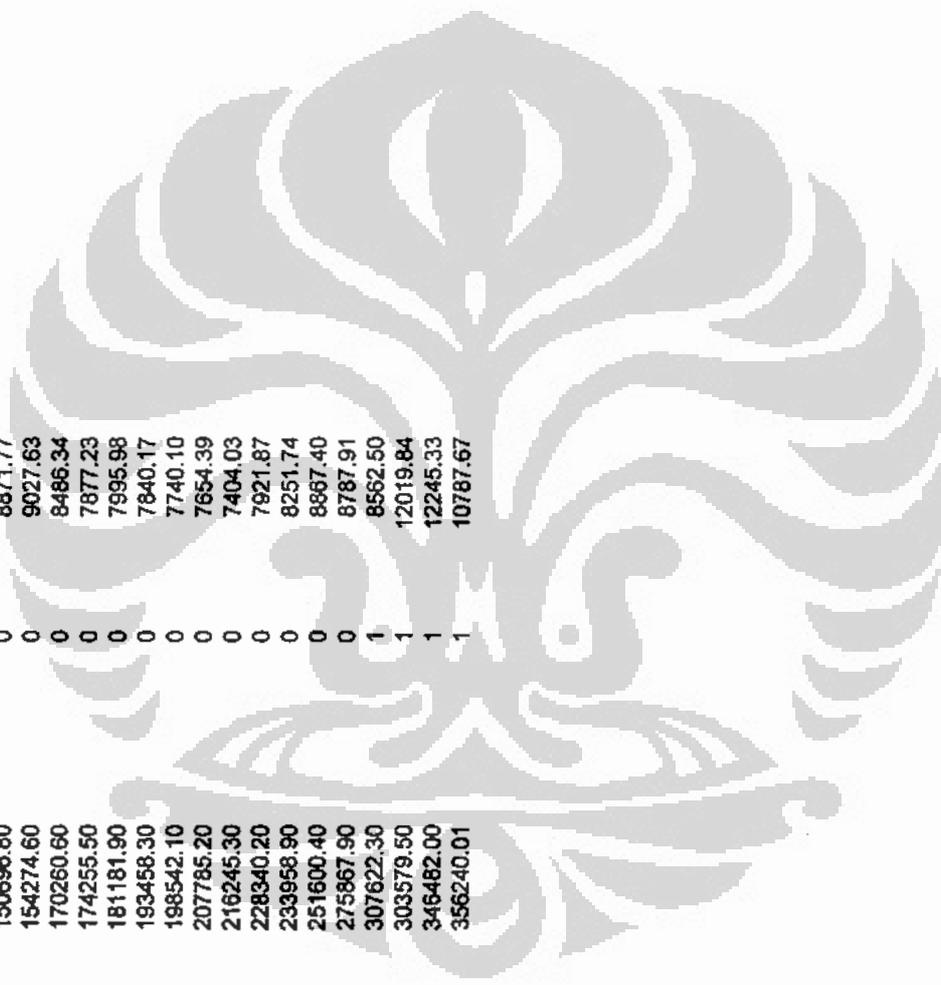


	IMPOR_ANORG	GDPI_ANORG	IJEPA_ANORG	KURS_ANORG	IMPOR_ORG	GDPI_ORG	IJEPA_ORG	KURS_ORG
TW1-05	758,489.91	146888.40	0	8842.71	838,902.88	146888.40	0	8842.71
TW2-05	731,264.19	150696.80	0	8871.77	659,713.40	150696.80	0	8871.77
TW3-05	658,715.13	154274.60	0	9027.63	529,697.00	154274.60	0	9027.63
TW4-05	833,806.14	170260.60	0	8486.34	728,471.98	170260.60	0	8486.34
TW1-06	781,321.89	174255.50	0	7877.23	713,790.59	174255.50	0	7877.23
TW2-06	858,052.22	181181.90	0	7995.98	760,270.80	181181.90	0	7995.98
TW3-06	770,205.98	193458.30	0	7840.17	586,142.77	193458.30	0	7840.17
TW4-06	849,331.74	198542.10	0	7740.10	620,790.60	198542.10	0	7740.10
TW1-07	671,798.93	207785.20	0	7654.39	928,680.93	207785.20	0	7654.39
TW2-07	722,667.71	216245.30	0	7404.03	856,117.23	216245.30	0	7404.03
TW3-07	822,954.41	228340.20	0	7921.87	974,996.35	228340.20	0	7921.87
TW4-07	882,633.70	233958.90	0	8251.74	1,283,271.07	233958.90	0	8251.74
TW1-08	911,850.97	251600.40	0	8867.40	1,248,376.47	251600.40	0	8867.40
TW2-08	873,921.08	275867.90	0	8787.91	919,169.88	275867.90	0	8787.91
TW3-08	1,061,504.17	307622.30	1	8562.50	565,168.74	307622.30	1	8562.50
TW4-08	782,007.03	303579.50	1	12019.84	400,756.00	303579.50	1	12019.84
TW1-09	1,140,289.94	346482.00	1	12245.33	4,651,094.79	346482.00	1	12245.33
TW2-09	1,840,271.28	356240.01	1	10787.67	6,739,973.25	356240.01	1	10787.67

	IMPOR_KIMIA	GDPI_KIMIA	IJEPA_KIMIA	KURS_KIMIA	IMPOR_PLASTIK	GDPI_PLASTIK	IJEPA_PLASTIK	KURS_PLASTIK
TW1-05	1,281,025.03	146888.40	0	8842.71	1,413,310.50	146888.40	0	8842.71
TW2-05	1,371,209.50	150696.80	0	8871.77	1,592,757.85	150696.80	0	8871.77
TW3-05	1,439,983.63	154274.60	0	9027.63	1,580,189.00	154274.60	0	9027.63
TW4-05	1,417,920.42	170260.60	0	8486.34	1,639,082.82	170260.60	0	8486.34
TW1-06	1,581,002.08	174255.50	0	7877.23	1,594,324.30	174255.50	0	7877.23
TW2-06	1,598,763.75	181181.90	0	7995.98	1,401,850.83	181181.90	0	7995.98
TW3-06	1,759,653.01	193458.30	0	7840.17	2,045,906.71	193458.30	0	7840.17
TW4-06	1,641,516.13	198542.10	0	7740.10	2,194,409.73	198542.10	0	7740.10
TW1-07	1,474,050.75	207785.20	0	7654.39	2,019,184.46	207785.20	0	7654.39
TW2-07	1,678,102.79	216245.30	0	7404.03	1,963,289.62	216245.30	0	7404.03
TW3-07	1,800,077.93	228340.20	0	7921.87	2,069,408.91	228340.20	0	7921.87
TW4-07	1,728,830.68	233958.90	0	8251.74	2,133,500.86	233958.90	0	8251.74
TW1-08	1,769,081.67	251600.40	0	8667.40	2,171,078.23	251600.40	0	8667.40
TW2-08	2,038,011.60	275867.90	0	8787.91	2,356,377.76	275867.90	0	8787.91
TW3-08	2,147,257.29	307622.30	1	8562.50	2,365,812.98	307622.30	1	8562.50
TW4-08	1,333,389.72	303579.50	1	12019.84	1,503,967.75	303579.50	1	12019.84
TW1-09	1,236,833.98	346482.00	1	12245.33	7,001,622.31	346482.00	1	12245.33
TW2-09	2,544,639.42	356240.01	1	10787.67	9,427,911.67	356240.01	1	10787.67

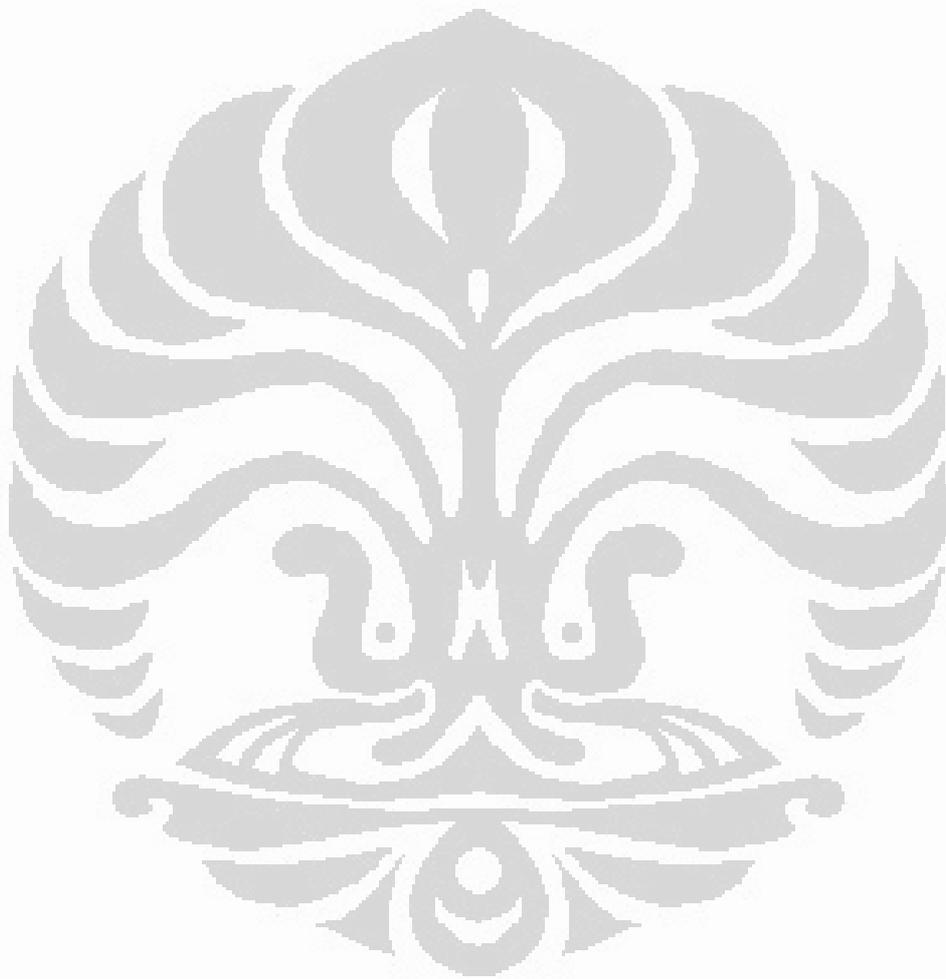
	IMPOR_KARET	GDPI_KARET	IJEPA_KARET	KURS_KARET	IMPOR_MIKA	GDPI_MIKA	IJEPA_MIKA	KURS_MIKA
TW1-05	328,892.51	146688.40	0	8842.71	16,301.03	146688.40	0	8842.71
TW2-05	352,439.97	150696.80	0	8871.77	18,591.34	150696.80	0	8871.77
TW3-05	355,323.04	154274.60	0	9027.63	11,839.02	154274.60	0	9027.63
TW4-05	408,000.83	170260.60	0	8486.34	4,860.56	170260.60	0	8486.34
TW1-06	472,285.34	174255.50	0	7877.23	1,305.16	174255.50	0	7877.23
TW2-06	268,536.45	181181.90	0	7995.98	-	181181.90	0	7995.98
TW3-06	415,082.52	193458.30	0	7840.17	801.20	193458.30	0	7840.17
TW4-06	448,804.06	198542.10	0	7740.10	-	198542.10	0	7740.10
TW1-07	429,055.66	207785.20	0	7654.39	-	207785.20	0	7654.39
TW2-07	485,542.54	216245.30	0	7404.03	229.54	216245.30	0	7404.03
TW3-07	356,136.22	228340.20	0	7921.87	1,792.24	228340.20	0	7921.87
TW4-07	440,844.55	233958.90	0	8251.74	2,718.97	233958.90	0	8251.74
TW1-08	504,893.13	251600.40	0	8867.40	1,685.89	251600.40	0	8867.40
TW2-08	542,305.16	275867.90	0	8787.91	-	275867.90	0	8787.91
TW3-08	527,609.67	307622.30	1	8562.50	263.88	307622.30	1	8562.50
TW4-08	745,648.09	303579.50	1	12019.84	226.12	303579.50	1	12019.84
TW1-09	8,256,770.98	346482.00	1	12245.33	756,159.04	346482.00	1	12245.33
TW2-09	8,020,398.13	356240.01	1	10787.67	767,003.56	356240.01	1	10787.67

	IMPOR_KACA	GDPI_KACA	IJEPA_KACA	KURS_KACA	IMPOR_BESI	GDPI_BESI	IJEPA_BESI	KURS_BESI
TW1-05	123,672.42	146688.40	0	8842.71	19,331,175.14	146688.40	0	8842.71
TW2-05	111,695.76	150696.80	0	8871.77	20,590,547.50	150696.80	0	8871.77
TW3-05	121,355.71	154274.60	0	9027.63	18,715,934.05	154274.60	0	9027.63
TW4-05	81,763.89	170260.60	0	8486.34	16,112,755.52	170260.60	0	8486.34
TW1-06	59,901.89	174255.50	0	7877.23	14,056,100.67	174255.50	0	7877.23
TW2-06	19,473.56	181181.90	0	7995.98	12,171,768.57	181181.90	0	7995.98
TW3-06	27,544.47	193458.30	0	7840.17	14,080,518.96	193458.30	0	7840.17
TW4-06	15,448.59	198542.10	0	7740.10	18,105,177.08	198542.10	0	7740.10
TW1-07	26,170.45	207785.20	0	7654.39	18,073,919.62	207785.20	0	7654.39
TW2-07	27,775.85	216245.30	0	7404.03	19,225,372.43	216245.30	0	7404.03
TW3-07	42,436.94	228340.20	0	7921.87	20,488,273.95	228340.20	0	7921.87
TW4-07	49,964.10	233958.90	0	8251.74	21,455,391.76	233958.90	0	8251.74
TW1-08	51,439.86	251600.40	0	8867.40	23,836,446.57	251600.40	0	8867.40
TW2-08	60,382.13	275867.90	0	8787.91	29,034,889.16	275867.90	0	8787.91
TW3-08	76,334.78	307622.30	1	8562.50	37,579,018.54	307622.30	1	8562.50
TW4-08	46,326.76	303579.50	1	12019.84	31,605,556.46	303579.50	1	12019.84
TW1-09	279,660.40	346482.00	1	12245.33	14,078,453.26	346482.00	1	12245.33
TW2-09	348,353.90	356240.01	1	10787.67	14,888,765.03	356240.01	1	10787.67



	IMPOR_BRGBESI	GDP1_BRGBESI	NEPA_BRGBESI	KURS_BRGBESI
TW1-05	6,564,814.42	146688.40	0	8842.71
TW2-05	7,455,777.78	150696.80	0	8871.77
TW3-05	10,582,813.18	154274.60	0	9027.63
TW4-05	14,998,248.44	170260.60	0	8486.34
TW1-06	15,814,175.55	174255.50	0	7877.23
TW2-06	8,859,824.95	181181.90	0	7995.98
TW3-06	7,740,824.53	193458.30	0	7840.17
TW4-06	6,871,751.26	198542.10	0	7740.10
TW1-07	8,625,547.38	207785.20	0	7654.39
TW2-07	7,191,003.58	216245.30	0	7404.03
TW3-07	9,373,599.55	228340.20	0	7921.87
TW4-07	9,600,119.10	233958.90	0	8251.74
TW1-08	9,251,853.96	251600.40	0	8867.40
TW2-08	9,854,947.50	275867.90	0	8787.91
TW3-08	8,819,011.03	307622.30	1	8562.50
TW4-08	9,402,780.54	303579.50	1	12019.84
TW1-09	13,463,854.01	346482.00	1	12245.33
TW2-09	8,164,541.07	356240.01	1	10787.67

Lampiran 5
Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.11/2008





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94/PMK.011/2008

TENTANG
MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kerjasama ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi sebagai pedoman untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari negara Jepang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Peretujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODALITAS
PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan modalitas penurunan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN

td.

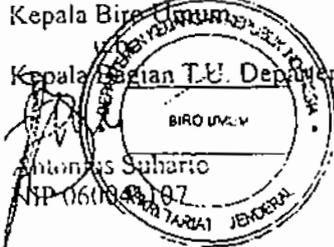
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 061004107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94/PMK.011/2008
TENTANG MODALITAS PENURUNAN
TARIF BEA MASUK DALAM
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM PERSETUJUAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
KEMITRAAN EKONOMI

KATEGORI BARANG	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
A	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi.
B3	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B5	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B7	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B10	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B15	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
X	Dikecualikan dari penurunan tarif bea masuk, berlaku tarif MFN.
P	Tarif bea masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan (<i>notes</i>) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN

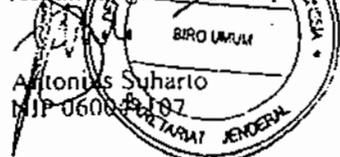
td

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro
Kepala Biro

Kepala Biro U. Departemen



Antonius Suharto
NIP. 0608.0107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94/PMK.011/2008
TENTANG MODALITAS PENURUNAN
TARIF BEA MASUK DALAM
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI

CATATAN-CATATAN (NOTES) MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK
ATAS KATEGORI BARANG P SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I

CATATAN	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
1	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.
2	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS).
3	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 15% pada tanggal implementasi. (b) 12% pada tanggal 1 Januari 2016.
4	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
5	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 20% pada tanggal implementasi. (b) 16% pada tanggal 1 Januari 2016.
6	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi. (b) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam skema Kesepakatan Perdagangan Barang sebagai bagian dari Kesepakatan Kerangka Kerja Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (AK-FTA) pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
7	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
8	Tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi. (b) 8% pada tanggal 1 Januari 2009. (c) 6% pada tanggal 1 Januari 2010. (d) 4% pada tanggal 1 Januari 2011. (e) 0% pada tanggal 1 Januari 2012.
9	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011.
10	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
11	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi. (b) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila terdapat perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
12	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi. (b) 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016.
13	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 60% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

14	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 45% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
15	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 40% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN

ud.

SRI MULYANI INDRAMATI

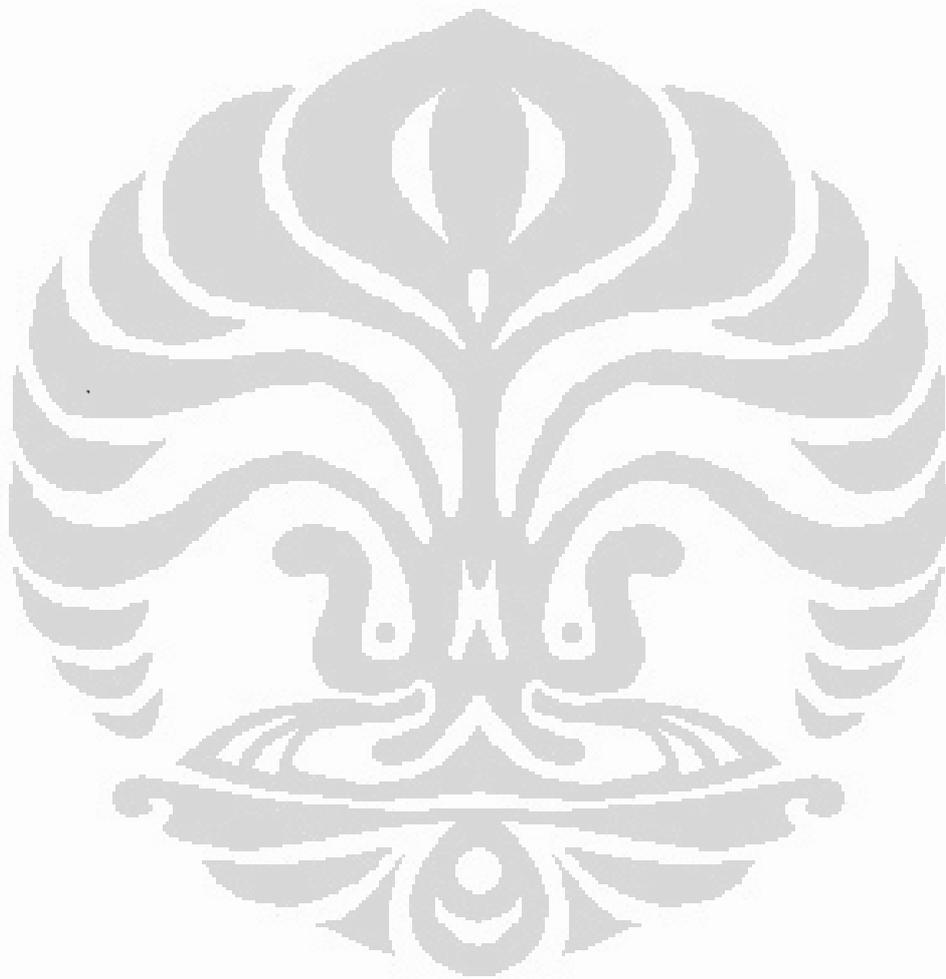
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian I U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041102



Lampiran 6
Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.11/2008





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 95/PMK.011/2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Menteri Keuangan menetapkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Peretujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Peretujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Jepang dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pemberlakuan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 5 Lampiran I dan kolom 6 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
 - b. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 6 Lampiran I dan kolom 7 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
 - c. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 7 Lampiran I dan kolom 8 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
 - d. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 8 Lampiran I dan kolom 9 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
 - e. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 9 Lampiran I dan kolom 10 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) sebagaimana dimaksud dalam butir a tidak diperlukan dalam hal tarif bea masuk dalam persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum;
- c. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada Pemberitahuan Pabean;
- d. Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) lembar asli wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor (PPI).

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap impor barang dengan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) yang telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN,

td

SRJ MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

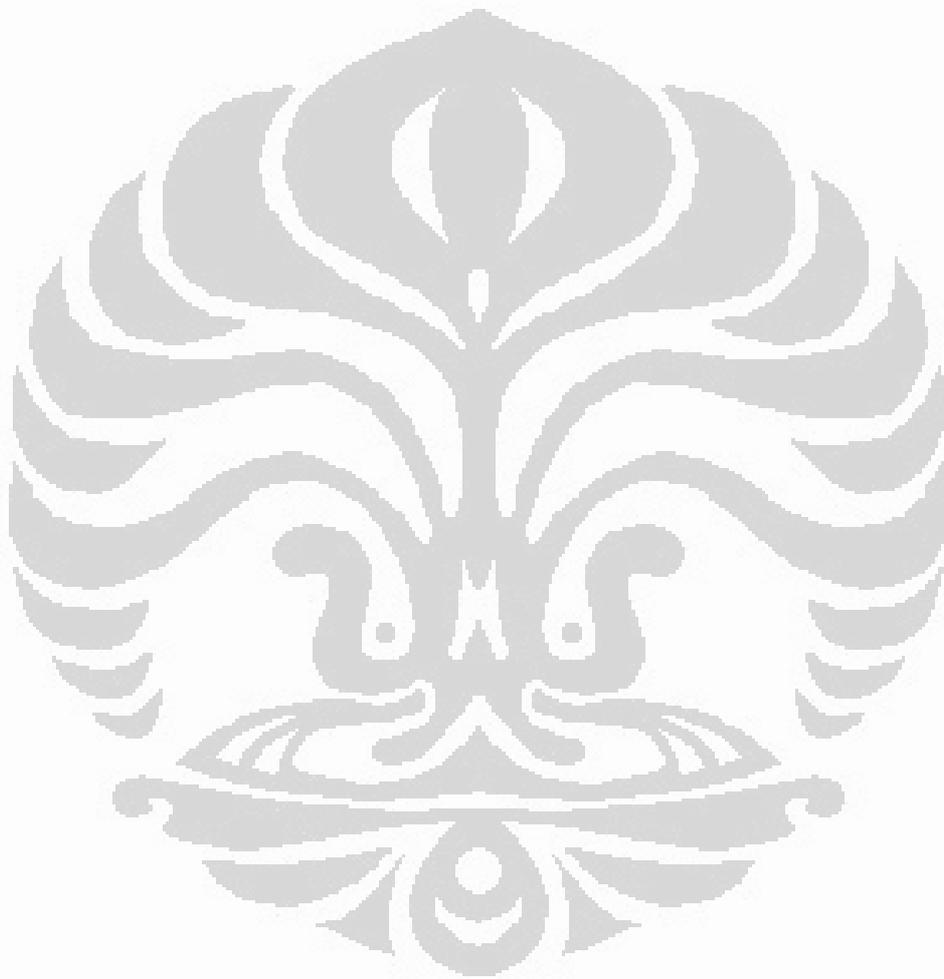
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Satrio
NIP 060041107

Lampiran 7
Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.11/2008





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 96 /PMK.011/2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS)* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 - b. bahwa berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 of Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement* diatur mengenai *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)*;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan tarif bea masuk dalam rangka skema *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)*;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Menteri Keuangan menetapkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. *User Specific Duty Free Scheme* yang selanjutnya disingkat dengan USDFS adalah skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *user* dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi atau disebut dengan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA).
2. *User* adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan fasilitas USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS (SKVI-USDFS) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
3. *Surveyor* adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian guna melakukan verifikasi terhadap pemohon fasilitas USDFS.
4. Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah hasil verifikasi industri yang dilakukan oleh *Surveyor* terhadap badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai *user* dan memuat rencana impor barang satu tahun.
5. Kantor pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan dan cukai.

Pasal 2

- (1) Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini yang berasal dan diimpor dari Jepang oleh *user* ditetapkan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Untuk menggunakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, *user* mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKVI-USDFS yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS kepada *user*.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan beserta alasannya.

Pasal 5

- (1) Importasi barang dalam rangka USDFS dilaksanakan sesuai tata laksana kepabeanan di bidang impor dan wajib dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang.
- (2) *User* wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada pemberitahuan pabean impor.

Pasal 6

- (1) Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atas kelebihan jumlah dan/atau perbedaan jenis barang dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku umum (MFN).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang termasuk dalam skema IJ-EPA, atas kelebihan jumlah dan/atau perbedaan jenis barang dipungut bea masuk berdasarkan tarif IJ-EPA.

Pasal 7

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib digunakan untuk kegiatan produksi oleh *user* yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan oleh *user* yang bersangkutan, *user* tersebut wajib membayar bea masuk atas barang berdasarkan tarif yang berlaku umum (MFN).

Pasal 8

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan, *user* bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang berdasarkan tarif bea masuk berlaku umum (MFN) dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini akan dievaluasi secara berkala berdasarkan masukan Menteri Perindustrian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelayanan dan pengawasan penggunaan tarif Bea Masuk USDFS diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

- a. bagi *user* yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan tanggal terbit sampai dengan tanggal 1 September 2008, dan telah membayar bea masuk dengan menggunakan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka atas kelebihan pembayaran bea masuk dapat dikembalikan;
- b. bagi *user* yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan tanggal terbit setelah tanggal 1 September 2008, maka berlaku tarif bea masuk USDFS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

